

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2017 SERI E.12

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, berimplikasi adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur bidang, seksi dan sub bagian serta perubahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 85, Seri D.34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pemerintahan Desa;
9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
11. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
12. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
15. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
- (2) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan tentang program SKPD, program lintas SKPD, program lintas kewilayahan dan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **14 Pebruari 2017**

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 , SERI E.12

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2014 - 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

S U M B E R

45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON

Nomor : / Kep..... /DPMD/2017

Tentang

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, berimplikasi adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur bidang, seksi dan sub bagian serta perubahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9

- Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016, tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- (2) Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tahun 2014-2019, meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD, tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan tentang program SKPD, program lintas SKPD, program lintas kewilayahan dan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 3

Perubahan RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2014-2019 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal :Februari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON


Drs. H. MEMET SURACHMAT

Pembina Utama Muda
NIP.19590401 198603 1 013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019 dapat terselesaikan.


Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, berimplikasi adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perubahan nomenklatur bidang, seksi dan sub bagian serta perubahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Cirebon terpilih yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dengan tetap memperhatikan nuansa kedaerahan.

Penyusunan Perubahan RENSTRA ini tentunya masih banyak kekurangan, baik substansi maupun narasi yang tertuang, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan Perubahan RENSTRA ini dapat bermanfaat untuk Kita semua.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, Februari 2017

→ KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON, 

Drs. H. MENET SURACHMAT

Pembina Utama Muda

NIP.19590401 198603 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan serta sasaran/tujuan yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang. Dinas PMD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun sebuah dokumen *Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi*.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019 yang merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi pembangunan Bupati Cirebon. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Perubahan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Cirebon untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2009-2014 periode sebelumnya. Juga beberapa isu strategis kemasyarakatan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renstra Dinas PMD ini yaitu :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi antara sekretariat serta bidang-bidang lingkup Dinas PMD Kabupaten Cirebon masih belum maksimal;
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Kurang berperannya lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan;
4. Kondisi sosial budaya masyarakat di Desa dan Kelurahan yang masih memprihatinkan;
5. Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan kearifan lokal di Tingkat Desa dan Kelurahan;
6. Lambannya pertumbuhan ekonomi di Desa dan Kelurahan sebagai akibat masih kurang berperannya lembaga-lembaga ekonomi di Desa dan Kelurahan;
7. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Memperhatikan isu-isu strategis tersebut, dirumuskan visi Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019 adalah sebagai berikut : **SEBAGAI MITRA DAN PEMANDU MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH)**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai *pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan*.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon , menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembangunan
2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumberdaya desa.
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel
5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 telah ditetapkan sebanyak 11 program dan 57 kegiatan dengan dukungan dana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 10 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 13 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD..... | 13 |
| 2.2 Sumber Daya SKPD..... | 24 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... | 27 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD... | 37 |
| BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... | 38 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... | 38 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 39 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 40 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 42 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 52 |
| BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN..... | 54 |
| 4.1 Visi dan Misi Dinas PMD..... | 54 |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD..... | 58 |
| 4.3 Strategi.dan Kebijakan Dinas PMD..... | 67 |
| BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | 72 |
| BAB VI : PENUTUP..... | 95 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Halaman

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN | 1 |
| | | Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... | 5 |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 13 |
| | | Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD..... | 28 |
| | | Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD | 34 |
| BAB III | : | PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD..... | 29 |
| | | Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Cirebon..... | 48 |
| BAB IV | : | VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN..... | 54 |
| | | Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD | 62 |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | 72 |
| | | Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif..... | 72 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah menjadi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon disusun sebagai wujud komitmen jajaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon IV bertanggungjawab pada Program, dan eselon III bertanggungjawab pada Kebijakan.

Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2009-2014 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selain berdampak positif juga berdampak negatif sehingga muncul

masalah baru dan masih tersisa berbagai masalah penting yang harus segera diatasi.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDes) telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2014. Undang-Undang ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

UUDes merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan UUDes akan berdampak luas dan karenanya berbagai aspek dari implementasi UUDes perlu diperhatikan dengan seksama.

UUDes menyatakan secara rinci maksud dan tujuannya yaitu :

- ✓ Redistribusi keuangan negara kepada lapisan rakyat terbawah yaitu masyarakat desa.
- ✓ Konsolidasi Anggaran Desa agar efisien dan mencegah kebocoran atau korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial.
- ✓ Konsolidasi kelembagaan yang mengurus desa dari 14 Kementerian sektoral menjadi 1 (satu) Kementerian Desa.
- ✓ Menempatkan Rakyat Desa sebagai subyek kemandirian agar berdaulat di bidang politik, ekonomi dan berkepribadian Indonesia secara gotong royong atau dengan semangat kesetiakawanan.

UUDes **mengubah secara mendasar** tentang :

- Skema, alokasi dan besarnya Dana untuk Desa sebagai usaha membagikan keadilan bagi rakyat desa di Indonesia yaitu : 72.944 Desa.
- Jalur Birokrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa dengan **memangkas** jalur birokrasi yang panjang dan penuh negosiasi, sektoral dan parsial **menjadi pola satu Pintu** perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan desa berjalan komprehensif melalui konsolidasi dana desa.
- Penempatan rakyat desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik terhadap desa dalam mengelola sumber daya desa, serta memulihkan ke gotong royongan rakyat desa dalam pembangunan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UUDes, secara tegas disebutkan bahwa tujuannya untuk memampukan desa dalam mengelola pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat serta tata ekonomi dan lingkungan.

- Pemberdayaan selain dilaksanakan oleh struktur Pemerintahan Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota juga dari **Unsur Desa sendiri dan pihak ketiga**.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu ada pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Pemberdayaan Masyarakat Desa secara kontinyu (dalam tahap tertentu) harus ada **pendamping yang profesional** yang berasal dari Dinas (SKPD) juga dari Pihak ke III.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat didalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. **Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya memiliki dua aspek pokok yakni : (1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*)** melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. **(2) meningkatkan kemandirian masyarakat** melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, sedangkan Pemerintahan Desa pada hakekatnya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang tepat dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Cirebon 2014-2019, mengacu dan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon 2009-2014, yang berorientasi kepada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang *dijanjikan pada saat kampanye sebagai calon bupati dan calon wakil bupati*. Visi dan misi bupati dan wakil bupati merupakan komitmen politik yang lahir atas dasar keprihatinan bupati dan wakil bupati terhadap berbagai masalah yang membebani masyarakat Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya visi dan misi bupati dan wakil bupati mengacu pada tujuan nasional yang penguangannya disesuaikan dengan kondisi potensi dan permasalahan daerah.

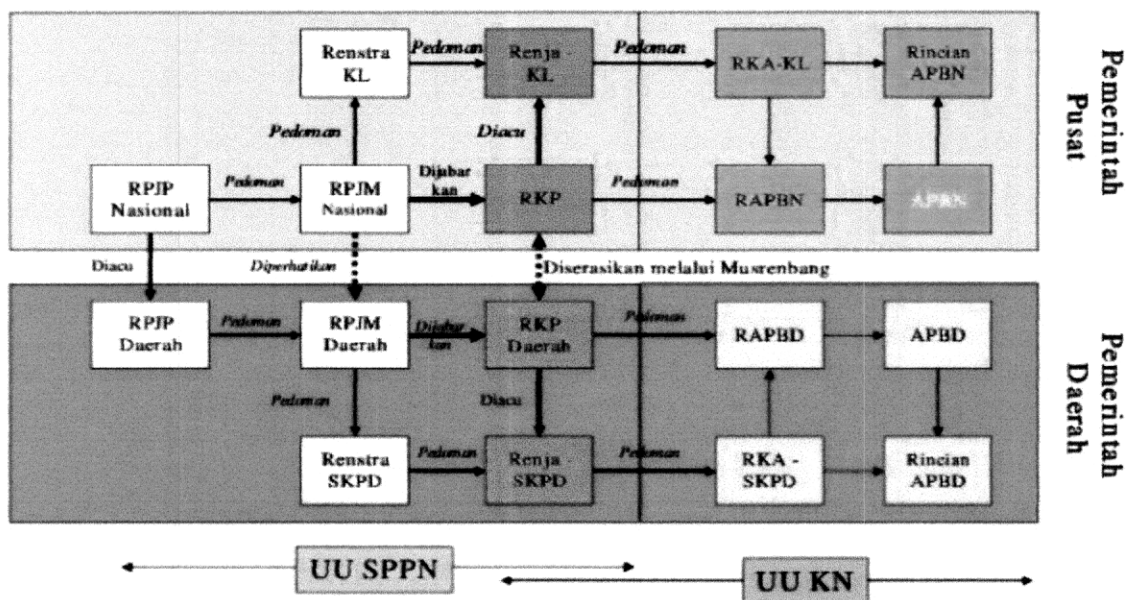
Visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2014-2019 ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon ***YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH)***. Sesungguhnya visi dan misi tersebut terintegrasi, holistik, dan multi sektoral yang perlu dijabarkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART, yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan *'sense of ownership'* dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;

- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 14) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

- 34) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6)
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 9, Seri D.6);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 16, Seri D.7);
- 42) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 61, Seri D.10);
- 43) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 85, Seri D.34).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh program dan kegiatan untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon guna kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- 2) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 4) Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional;
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan;
- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten guna pencapaian sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, *mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya*, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan tentang program SKPD, program lintas SKPD, program lintas kewilayahan dan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri. D.7) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - d. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan instansi terkait;
 - f. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab

- kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana/kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsure staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
 - Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas
 - Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

- i. Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. *Pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;*
 - l. Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. *Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan*
 - o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. *Pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran Dinas;*
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - k. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/asset;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - c. Pengelolaan kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - d. Pengoordinasian kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - e. Pengelolaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa dan merumuskan langkah-langkah kebijakan saran pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa.

SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

- (1) Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - e. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;

- h. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial budaya masyarakat.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

- (1) Seksi kelembagaan dan pelatihan masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan tugas kelembagaan masyarakat desa;
 - c. Pengelolaan urusan kelembagaan masyarakat desa;
 - d. Perumusan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, pelatihan dan pengurusan kelembagaan masyarakat desa.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa dan merumuskan langkah kebijakan saran pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan di Ekonomi dan Pembangunan Desa;
 - d. Pengoordinasian kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Desa;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan usaha ekonomi dan pembangunan desa.

SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang usaha ekonomi masyarakat desa dan teknologi tepat guna.

SEKSI PEMBANGUNAN DESA

- (1) Seksi Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pembangunan desa dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pembangunan perdesaan bersama masyarakat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan Pembangunan Desa.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
 - d. Pengelolaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervise, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, BPD, pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - f. Perumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan kuwu, perangkat desa, BPD, keuangan desa, penetapan dan penegasan batas desa;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan pemerintahan desa.

SEKSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN BPD

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Penyusunan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak dan memfasilitasi pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai perangkat desa dan pemberian nomor register perangkat desa;
 - d. Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
 - e. Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang peresmian anggota BPD dan peresmian pemberhentian anggota BPD;
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kuwu dan perangkat desa;
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan fasilitasi kuwu dan perangkat desa;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, supervise dan fasilitasi BPD;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kelembagaan dan perangkat.

SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN

- (1) Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan aset/kekayaan dan keuangan desa;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan penghitungan besaran alokasi dana desa dan dana desa dari APBN untuk setiap desa berdasarkan data yang tersedia dan variable yang telah ditentukan;

- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan berkas tukar menukar tanah kas desa;
 - e. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan system informasi keuangan dan aset desa;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan system informasi keuangan dan aset desa;
 - g. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, supervise dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - j. Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan Kekayaan dan Keuangan Desa.

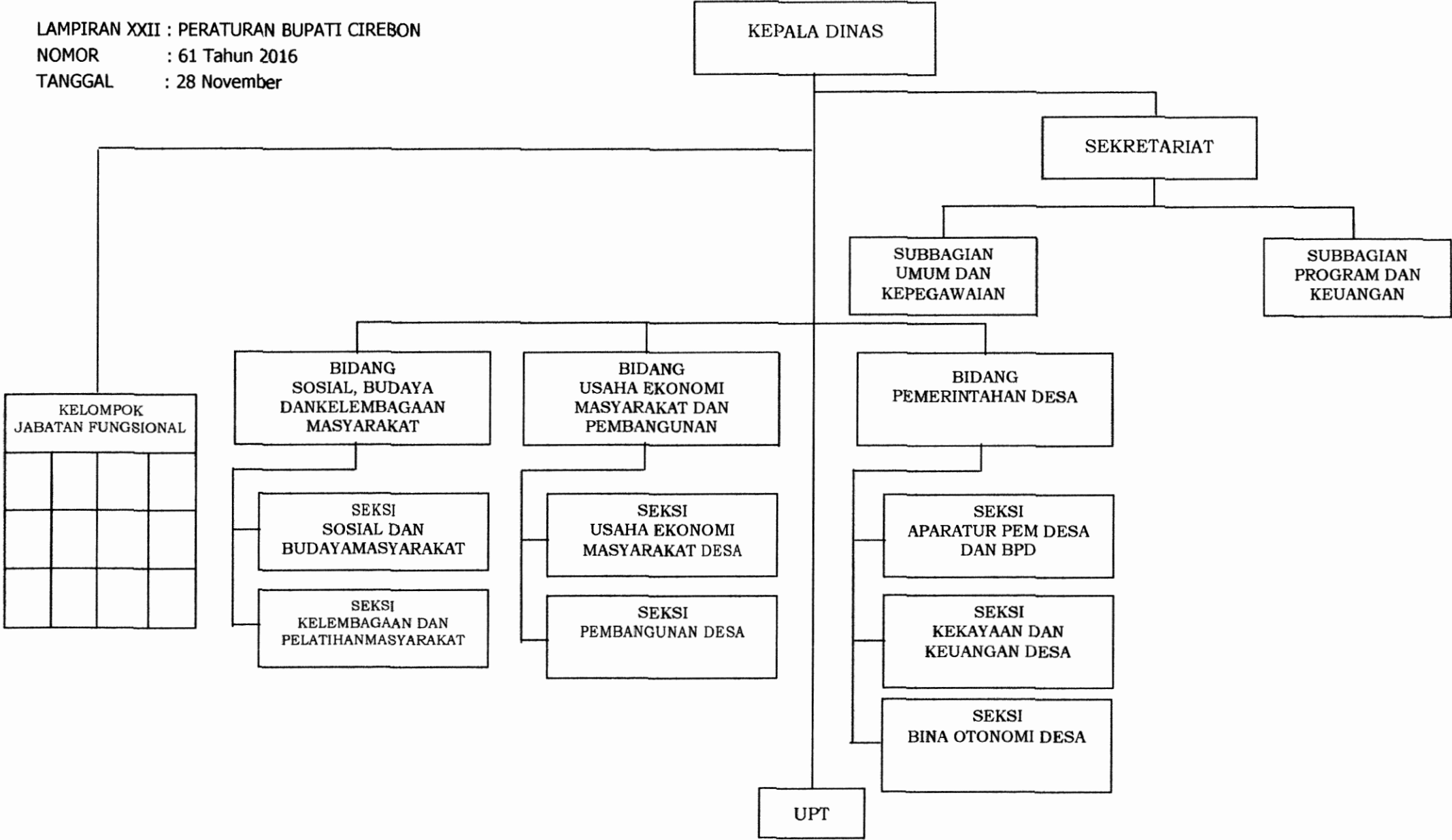
SEKSI BINA OTONOMI DESA

- (1) Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai daftar inventarisasi kewenangan desa, penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, fasilitasi dan koordinasi pembuatan peta dan batas wilayah desa;
 - f. Fasilitasi dan menangani penyelesaian permasalahan kedesaan dan otonomi desa;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam upaya penyelesaian permasalahan kedesaan dan otonomi desa;
 - h. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
 - i. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai kuwu, perangkat desa, BPD dan musyawarah desa;
 - j. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pedoman administrasi pemerintahan desa;
 - k. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai penetapan dan penegasan batas desa;
 - l. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pengelolaan aset desa dan keuangan desa;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Otonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Otonomi Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan Pembinaan Otonomi Desa.

Susunan atau Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November



2.2 Sumber Daya SKPD

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Desa.
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan;
 - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - b. Seksi Kekayaan dan Keuangan Desa;
 - c. Seksi Bina Otonomi Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 30 orang, yang terbagi pada 3 Bidang dan Kesekretariatan. 2 (dua) bidang membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) bidang membawahi 3 (tiga) seksi, sehingga berjumlah 7 seksi serta 2 Sub Bagian di Kesekretariatan. Dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| Kepala Dinas (Eselon II) | : | 1 Orang |
| Sekretaris Dinas (Eselon III a) | : | 1 Orang |
| Kepala Bidang (Eselon IIIb) | : | 3 Orang |
| Kepala Seksi/Sub bag (Eselon IVa) | : | 9 Orang |
| Staf (Pelaksana) | : | 16 Orang |

Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan formal pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon umumnya **cukup tinggi**, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 8 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 15 orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

| No. | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|--------|------------------------|----------------|
| 1. | S2 | 8 |
| 2. | S1 | 15 |
| 3. | D3 | 0 |
| 4. | SLTA | 7 |
| 5. | SLTP | 0 |
| 6. | SD | 0 |
| Jumlah | | 30 |

2. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017 berdasarkan Pangkat/Golongan :

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah (Orang) |
|-----|------------------|----------------|
| 1. | IV/c | 1 |
| | IV/b | 2 |
| | IV/a | 4 |
| 2. | III/d | 4 |
| | III/c | 3 |
| | III/b | 5 |
| | III/a | 4 |
| 3 | II/d | 0 |

| | | |
|--------|------|----|
| | II/c | 0 |
| | II/b | 6 |
| | II/a | 1 |
| 4 | I/d | 0 |
| | I/c | 0 |
| Jumlah | | 30 |

3. Data Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017 berdasarkan eselon :

| No. | Pejabat Struktural | Jumlah (Orang) |
|--------|--------------------|----------------|
| 1. | Eselon II | 1 |
| 2. | Eselon III | 4 |
| 3. | Eselon IV | 9 |
| Jumlah | | 14 |

4. Data Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017 :

| No. | Pejabat Fungsional | Jumlah (Orang) |
|--------|--------------------|----------------|
| 1. | Arsiparis | 0 |
| Jumlah | | 0 |

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 s.d 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, menerima alokasi anggaran sebagai berikut :

| Anggaran selama 3 tahun (2014, 2015 dan 2016) | | | | |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| No | TAHUN | JUMLAH | | REALISASI |
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) |
| 1 | 2014 | 9,345,265,475 | 8,931,397,498 | 95,57 |
| 2 | 2015 | 8,812,014,121 | 8,580,700,830 | 97,38 |
| 3 | 2016 | 9,985,624,400 | 9,564,523,973 | 95,78 |
| TOTAL | | 28,142,903,996 | 27,076,622,301 | 96,21 |

Secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat kenaikan sebesar 6,85% dari mulai tahun 2014 sebesar **Rp. 9,345,265,475** dan **Rp. 9,985,624,400** pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon cukup baik dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian (%) Tahun Ke | | | | |
|-----|---|------------|---|--------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|------|----------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 100 | 60 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| | | 100% | tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 106 | 106 | | | | 42 | 42 | | | |
| | | 100% | terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | | | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | terlaksananya pembangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya kendaraan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |

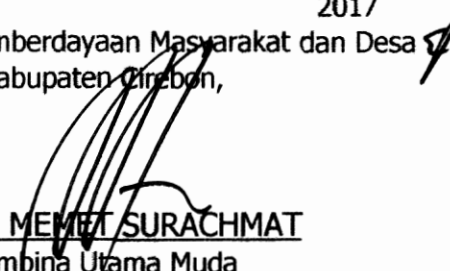
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 3 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| 4 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 100 | | | |
| 5 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 6 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| 7 | Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan | 100% | Meningkatnya jumlah LPMD/K yang berpartisipasi aktif terhadap pembangunan pedesaan | | 35 | 50 | 50 | 70 | 85 | 35 | 50 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | | 461 | 538 | 615 | 692 | 769 | 729 | 738 | | | | 158 | 137 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa/kel. yang mendukung bulan bakti gotong royong masyarakat | | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah KPM yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat | | 13 | 24 | 19 | 15 | 0 | 13 | 53 | | | | 100 | 221 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah pengurus/anggota LPMD/K dalam perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa | | 50 | 32 | 67 | 32 | 32 | 25 | 70 | | | | 50 | 219 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah RT/RW yang aktif membantu pemerintah desa dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan | | 45 | 34 | 20 | 10 | 0 | 90 | 150 | | | | 200 | 441 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah pengurus/anggota LPMD/K yg aktif membantu pemerintah desa dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan | | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 8 | Meningkatkan perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bumdes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat | 100% | Meningkatnya jumlah Bumdes dan kapasitas manajemen pengurus BUMDES | | 47 | 30 | 40 | 40 | 40 | 13 | 175 | | | | 28 | 583 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah kelompok usaha yang terampil | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | 130 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah pelaku PNPM-MPd yang tertib administrasi pd pelaksanaan proyek PNPM-MPd | | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat nasional dan meningkatnya inovasi teknologi tepat guna untuk mengeksplorasi sumber daya desa/kelurahan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah kelompok usaha yg mampu mensejahterakan ekonomi keluarga | | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | | | | 125 | 450 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah kelompok usaha ekonomi produktif | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah posyantek di setiap desa, | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah anggota Tim Verifikasi Perguliran, UPK dan Kasi Ekbang, serta BPD yang aktif melestarikan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan | | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 | 383 | | | | 0 | 100 | | | |
| 9 | Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa | 100% | meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yg mampu mengoptimalkan potensi sumber daya desa | | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 250 | | | | 0 | 118 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg mampu menyusun RPJMDes dan APBDes | | 19 | 75 | 412 | 412 | 412 | 75 | 80 | | | | 395 | 107 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg mampu memfasilitasi pengaduan raskin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang tertib administrasi terkait dg pembangunan desa yg bersumber dari bantuan provinsi dan pusat | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah kelompok usaha ekonomi lemah yang terlatih | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah desa/kel. yg mampu memanfaatkan sumber daya desa/kelurahan. | | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg memiliki batas desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 10 | Meningkatkan kapasitas aparaturn pemdes yg bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | 100% | Jumlah aparaturn desa yg berpartisipasi dlm pembangunan kawasan perdesaan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah aparaturn desa yang mampu mengelola keuangan desa | | 80 | 124 | 40 | 40 | 40 | 74 | 300 | | | | 93 | 242 | | | |
| | | 100% | meningkatnya jumlah aparaturn desa yang mampu mengelola manajemen pemerintahan desa | | 40 | 70 | 30 | 39 | 48 | 30 | 80 | | | | 75 | 114 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg tertib administrasi dlm proses pemilihan kuwu | | 124 | 0 | 66 | 70 | 75 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | meningkatnya jumlah desa yang memiliki profil desa/kelurahan yang up date | | 40 | 80 | 80 | 80 | 85 | 40 | 424 | | | | 100 | 530 | | | |
| | | 100% | meningkatnya jumlah anggota BPD yang mampu mengelola pemerintahan desa | | 40 | 103 | 150 | 175 | 200 | 40 | 150 | | | | 100 | 146 | | | |
| | | 100% | meningkatnya jumlah aparaturn desa yang mampu menyusun peraturan di desa | | 70 | 70 | 70 | 72 | 78 | 58 | 124 | | | | 83 | 177 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg mampu menyelenggarakan pemilihan kuwu | | 124 | 0 | 118 | 85 | 85 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg tertib administrasi dlm penyelenggaraan pemerintahan desa | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah kuwu yang dilantik | | 124 | 0 | 118 | 85 | 85 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah Raperbup yang dievaluasi | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 11 | Meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintah kec. yg bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | 100% | Jumlah aparaturn kecamatan yg mampu membina aparaturn desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | | | | 100 | 100 | | | |

➤ Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

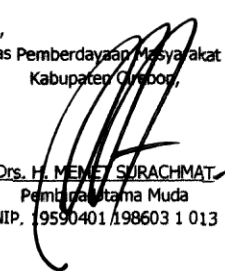
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|---|-------------------------|----------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|----|----|----|---|------------|----|----|----|-----------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | BELANJA DAERAH | 8,812,014,121 | 9,985,624,400 | | | | 8,580,700,830 | 8,981,187,189 | | | | 97 | 90 | | | | 13 | (8) |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,606,946,000 | 2,899,662,000 | | | | 2,634,791,293 | 2,634,791,293 | | | | 101 | 91 | | | | 11 | (10) |
| | BELANJA LANGSUNG | 6,205,068,121 | 7,085,962,400 | | | | 5,945,909,537 | 6,346,395,896 | | | | 96 | 90 | | | | 14 | (7) |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 620,564,943 | 443,198,100 | | | | 545,057,787 | 349,632,226 | | | | 88 | 79 | | | | (29) | (10) |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187,690,400 | 165,600,000 | | | | 128,586,787 | 89,458,526 | | | | 69 | 54 | | | | (12) | (21) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 7,200,000 | 7,599,000 | | | | 4,556,000 | 6,942,100 | | | | 63 | 91 | | | | 6 | 44 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 22,500,000 | 20,795,600 | | | | 22,500,000 | 20,795,600 | | | | 100 | 100 | | | | (8) | 0 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27,000,000 | 29,150,000 | | | | 27,000,000 | 29,150,000 | | | | 100 | 100 | | | | 8 | 0 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1,250,000 | 2,500,000 | | | | 1,250,000 | 2,500,000 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 0 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 259,684,543 | 90,000,000 | | | | 246,975,000 | 86,000,000 | | | | 95 | 96 | | | | (65) | 0 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18,120,000 | 14,910,000 | | | | 17,120,000 | 14,910,000 | | | | 94 | 100 | | | | (18) | 6 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 30,140,000 | 27,063,500 | | | | 30,140,000 | 27,063,500 | | | | 100 | 100 | | | | (10) | 0 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 66,980,000 | 85,580,000 | | | | 66,930,000 | 72,812,500 | | | | 100 | 85 | | | | 28 | (15) |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 535,271,304 | 235,276,500 | | | | 512,907,000 | 227,646,500 | | | | 96 | 97 | | | | (56) | 1 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 275,400,000 | 0 | | | | 263,990,000 | 0 | | | | 96 | 0 | | | | (100) | (100) |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 109,357,304 | 123,812,500 | | | | 106,822,000 | 123,112,500 | | | | 98 | 99 | | | | 13 | 2 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 102,564,000 | 102,564,000 | | | | 94,248,000 | 95,634,000 | | | | 92 | 93 | | | | 0 | 1 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10,800,000 | 8,900,000 | | | | 10,800,000 | 8,900,000 | | | | 100 | 100 | | | | (18) | 0 |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 37,150,000 | 0 | | | | 37,047,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 28,585,000 | 9,735,000 | | | | 27,885,000 | 9,735,000 | | | | 98 | 100 | | | | (66) | 3 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 23,635,000 | 9,735,000 | | | | 22,935,000 | 9,735,000 | | | | 97 | 100 | | | | (59) | 3 |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 4,950,000 | 0 | | | | 4,950,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | 40,000,000 | | | | 0 | 38,700,000 | | | | 0 | 97 | | | | 100 | 100 |
| | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bkd.Kepegawain/ISO | 0 | 40,000,000 | | | | 0 | 38,700,000 | | | | 0 | 97 | | | | 100 | 100 |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 64,255,500 | 71,511,000 | | | | 64,255,500 | 70,426,600 | | | | 100 | 98 | | | | 11 | (2) |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,500,000 | 15,000,000 | | | | 11,500,000 | 15,000,000 | | | | 100 | 100 | | | | 30 | 0 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 7,755,500 | 7,755,500 | | | | 7,755,500 | 7,755,500 | | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 5,000,000 | 7,755,500 | | | | 5,000,000 | 7,755,500 | | | | 100 | 100 | | | | 55 | 0 |
| | Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,315,600 | | | | 100 | 95 | | | | 0 | (5) |
| | Penyusunan Laporan Tahunan Badan | 9,000,000 | 10,000,000 | | | | 9,000,000 | 10,000,000 | | | | 100 | 100 | | | | 11 | 0 |
| | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,600,000 | | | | 100 | 98 | | | | 0 | (3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|-----|-----|--|--|-------|-------|
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | 33,000,000 | 65,000,000 | | | | 32,167,600 | 65,000,000 | | | | 97 | 100 | | | 97 | 3 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | 12,000,000 | 40,000,000 | | | | 11,168,000 | 40,000,000 | | | | 93 | 100 | | | 233 | 7 |
| | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD | 11,000,000 | 15,000,000 | | | | 10,999,600 | 15,000,000 | | | | 100 | 100 | | | 36 | 0 |
| | Penyusunan Pembuatan Profil Badan | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | 100 | 100 | | | 0 | 0 |
| 7 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1,320,981,408 | 2,303,145,200 | | | | 1,308,469,700 | 2,291,030,200 | | | | 99 | 99 | | | 74 | 0 |
| | Orientasi Pengurus LPMD/K | 104,852,800 | 380,350,000 | | | | 104,852,800 | 378,500,000 | | | | 100 | 100 | | | 263 | (0) |
| | Fasilitasi Penguatan TP. PKK | 571,734,972 | 572,660,000 | | | | 565,318,500 | 568,630,000 | | | | 99 | 99 | | | 0 | 0 |
| | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Polganal Posyandu | 118,010,036 | 476,000,000 | | | | 115,371,800 | 474,770,000 | | | | 98 | 100 | | | 303 | 2 |
| | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 242,693,900 | 200,000,000 | | | | 241,276,900 | 196,220,000 | | | | 99 | 98 | | | (18) | (1) |
| | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 58,085,000 | 380,000,000 | | | | 56,045,000 | 379,370,000 | | | | 96 | 100 | | | 554 | 3 |
| | Pelatihan P3MD | 110,420,700 | 130,000,000 | | | | 110,420,700 | 129,685,000 | | | | 100 | 100 | | | 18 | (0) |
| | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW | 115,184,000 | 164,135,200 | | | | 115,184,000 | 163,855,200 | | | | 100 | 100 | | | 42 | (0) |
| 8 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 910,191,100 | 1,233,025,200 | | | | 877,070,100 | 778,409,200 | | | | 96 | 63 | | | 35 | (34) |
| | Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa | 73,615,000 | 406,625,000 | | | | 61,195,000 | 383,380,000 | | | | 83 | 94 | | | 452 | 13 |
| | Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | 251,866,850 | 0 | | | | 251,491,850 | 0 | | | | 100 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Pembinaan Administrasi Proyek PNPB Mandiri Perdesaan | 340,109,250 | 0 | | | | 334,679,250 | 0 | | | | 98 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional | 100,000,000 | 244,010,000 | | | | 98,212,000 | 216,980,000 | | | | 98 | 89 | | | 144 | (9) |
| | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal | 74,600,000 | 178,650,600 | | | | 61,492,000 | 178,049,200 | | | | 82 | 100 | | | 139 | 21 |
| | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | 0 | (100) |
| | Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPB-MPd | 0 | 333,739,600 | | | | 0 | 333,042,600 | | | | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| 9 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 640,210,522 | 1,534,216,000 | | | | 570,022,050 | 1,425,689,770 | | | | 89 | 93 | | | 140 | 4 |
| | Pembinaan Kelompok Masyarakat | 0 | 269,484,000 | | | | 0 | 254,460,000 | | | | 0 | 94 | | | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 60,894,800 | 234,732,000 | | | | 48,361,000 | 223,932,000 | | | | 79 | 95 | | | 285 | 20 |
| | Fasilitasi TMMD dan BSMSS | 203,368,272 | 430,000,000 | | | | 162,533,600 | 425,695,270 | | | | 80 | 99 | | | 111 | 24 |
| | Penyelenggaraan Perombaan Desa | 227,081,250 | 450,000,000 | | | | 225,991,250 | 386,782,500 | | | | 100 | 86 | | | 98 | (14) |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | 148,866,200 | 150,000,000 | | | | 133,136,200 | 134,820,000 | | | | 89 | 90 | | | 1 | 0 |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1,894,432,000 | 1,075,992,000 | | | | 1,856,422,400 | 1,056,713,000 | | | | 98 | 98 | | | (43) | 0 |
| | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 153,832,000 | 300,992,000 | | | | 151,454,000 | 300,632,000 | | | | 98 | 100 | | | 96 | 1 |
| | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa | 700,000,000 | 250,000,000 | | | | 700,000,000 | 247,584,000 | | | | 100 | 99 | | | (64) | (1) |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Fasilitas Pemilihan Kuvu | 116,980,000 | 0 | | | | 116,980,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Penyusunan Profil Desa/Kelurahan | 189,000,000 | 200,000,000 | | | | 176,954,400 | 192,870,000 | | | | 94 | 96 | | | 6 | 3 |
| | Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa | 175,720,000 | 100,000,000 | | | | 162,950,000 | 91,660,000 | | | | 93 | 92 | | | (43) | (1) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|-------|-------|
| Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa | 26,000,000 | 100,000,000 | | | | 26,000,000 | 99,300,000 | | | | | 100 | 99 | | | | 285 | (1) |
| Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu | 350,000,000 | 0 | | | | 341,904,000 | 0 | | | | | 98 | 0 | | | | (100) | (100) |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 107,900,000 | 100,000,000 | | | | 105,180,000 | 100,000,000 | | | | | 97 | 100 | | | | (7) | 3 |
| Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih | 75,000,000 | 0 | | | | 75,000,000 | 0 | | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan | 0 | 25,000,000 | | | | 0 | 24,667,000 | | | | | 0 | 99 | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | 157,576,344 | 74,863,400 | | | | 151,652,400 | 72,113,400 | | | | | 96 | 96 | | | | (52) | 0 |
| Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan | 157,576,344 | 74,863,400 | | | | 151,652,400 | 72,113,400 | | | | | 96 | 96 | | | | (52) | 0 |

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. MENE SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401198603 1 013

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon selama 2 tahun berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi Kelembagaan yang ada di Masyarakat belum optimal dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
2. Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Cirebon belum mencapai kepada perekonomian yang kuat.
3. Peningkatan pembangunan Desa, potensi Desa dan Sumberdaya Desa/Kelurahan belum menunjukkan hasil yang optimal.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
5. Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan belum secara optimal dalam pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon dalam 3 tahun mendatang, yakni 2017-2019 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa untuk maju;
2. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
3. Tersedianya potensi Desa dan sumberdaya Desa untuk peningkatan pembangunan Desa;
4. Adanya kemauan yang keras bagi aparatur pemerintahan Desa untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Adanya upaya terstruktur dan sistematis bagi aparatur kecamatan dalam membina aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarannya kurang memadai, masih adanya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2014-2019 adalah : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Misi pertama, Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

Misi Kedua, Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan

Misi Ketiga, Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

Misi Keempat, Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas)

Misi Kelima, Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram

Misi Keenam, Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | Jumlah penduduk miskin yg cenderung meningkat | Kurangnya SDM yg berkompeten dibidang-bidang tertentu | DPMD Prov. Jabar mrp OPD yg melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masy. Dan desa dg peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan. |
| 2 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat | Meningkatnya jumlah pengangguran. | Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan. | DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yg optimal |
| 3 | Pemantapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) | Migrasi penduduk desa ke perkotaan | Belum optimalnya prasarana pendukung utk melaksanakan seluruh tupoksi secara computerise | Program pemberdayaan masy. Dan desa scr kelembagaan ditangani dari pusat oleh direktorat perkotaan dan perdesaan Bappenas, direktorat jenderal pemberdayaan masy. Dan desa sampai daerah yakni prov. Sampai |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | kabupaten/kota, yg bersinergi dan berorientasi scr berjenjang. |
| 4 | Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosbud masy. | Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pd masy.desa dan perkotaan yg diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masy. Dlm pembangunan. | Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sbg bangsa Indonesia yg dicirikan dari : (a) menurunnya integrasi social masy, (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong Masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas Kebersamaan dan keanekaragaman, (c) menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Adanya dukungan sumber dana utk menjalankan visi, misi dan Tupoksi DPMD |
| 5 | Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa | Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan | Kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun. | Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik. |
| 6 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Ttg | Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan. | Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat. | |
| 7 | | Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan. | | |
| 8 | | Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relative masih rendah | | |
| 9 | | Belu seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS | | |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau

program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyusunan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 merujuk pada perumusan hasil telaah lingkungan hidup strategis. Adapun isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya, adanya kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon yang belum dijabarkan ke bentuk rencana tata ruang yang lebih operasional dan rencana sektor yang berkesesuaian dengan kebutuhan dalam pengembangan tata ruang.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang

membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan.

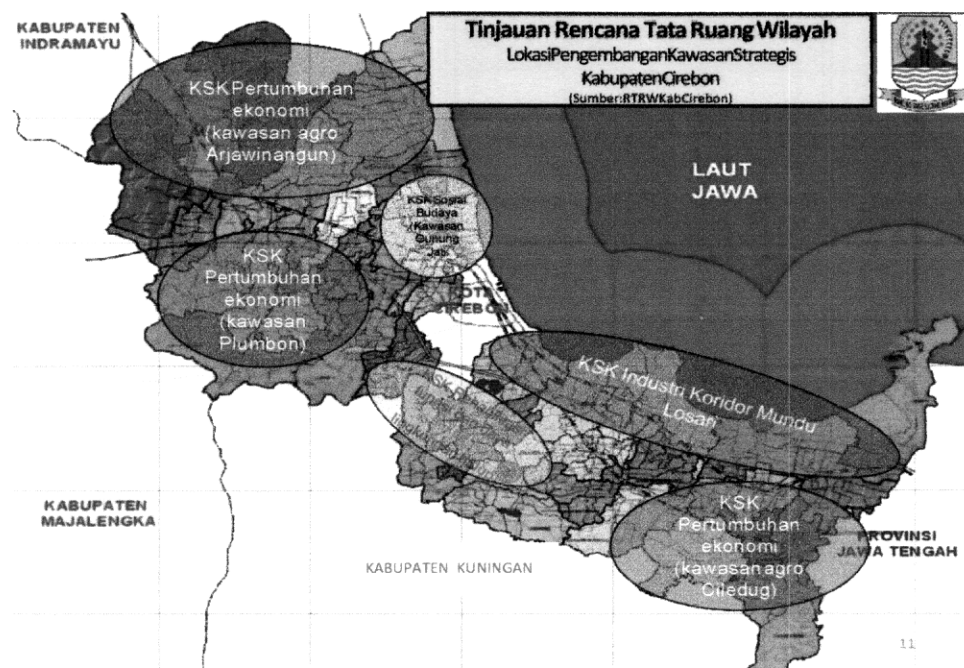
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi :

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi meliputi :
 1. Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;
 2. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 3. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 4. Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten

- b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi :
1. *Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di bagian tengah hingga bagian utara;*
 2. *Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;*
 3. *Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.*
- c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi :
1. *Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata alam; dan*
 2. *Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata.*
- d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi :
1. *Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;*
 2. *Meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);*
 3. *Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;*
 4. *Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan*
 5. *Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.*
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi :
1. *Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;*
 2. *Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung;*

dan

3. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi :
 1. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 2. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :
 1. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.



Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL.

Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

- a. **PKL Ciledug dan PKLp Losari** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;
Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan;
Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman
- b. **PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura** dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;
Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu;
Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng
- c. **PKL Sumber dan PKLp Weru** dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati
- d. **PKL Palimanan dan PKLp Plumbon** dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan,

e. **PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan** dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Peta Struktur Ruang Kabupaten Cirebon
(Sumber : Bappeda Kab. Cirebon, 2011)

48

Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Isu strategis pertama, yang paling menonjol adalah adanya alih fungsi lahan dimana proporsi lahan tidak terbangun semakin menyempit. Hal ini sebagai konsekuensi karena wilayah Kabupaten Cirebon merupakan tujuan investasi terutama aktivitas pembangunan perumahan, industri, dan perdagangan. *Alih fungsi lahan juga merambah pada kawasan lindung seperti wilayah sempadan sungai, sempadan pesisir, situ, dan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi).* Dampaknya berupa penyempitan lahan pertanian, berkurangnya resapan air, dan menurunnya kualitas lingkungan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah 30%, *dimana pemerintah daerah (publik) bertanggung jawab menyediakan 20% dan 10% oleh pihak swasta atau masyarakat.* Tata ruang wilayah merupakan bagian penting dalam upaya konsolidasi penggunaan lahan. Tata ruang wilayah menjadi panduan dalam pengembangan wilayah. Namun, permasalahan pengembangan wilayah berbasis penataan ruang menghadapi berbagai kendala, yaitu belum adanya penetapan wilayah berdasarkan kondisi rinci atau detail ruang; *pengembangan wilayah tampak tidak beraturan, tidak membentuk pola;* belum adanya sistem pengelolaan ruang; belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Isu strategis yang pertama ini harus direspon secara cepat oleh DPMD dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga *ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.* Selanjutnya pemahaman pegawai DPMD terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu strategis kedua, berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. *Alih fungsi lahan di Kabupaten Cirebon*

terutama terjadi pada berubahnya fungsi fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya *produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun* dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Cirebon, khususnya dalam lingkup wilayah Ciayumajakuning, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Cirebon. Kondisi ini menuntut DPMD untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu strategis ketiga, yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Cirebon seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, DPMD perlu menyusun rencana pemberdayaan dan pembangunan kawasan perdesaan yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri serta lokasi pembuangan sampah akhir yang belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri dan kawasan pembuangan sampah. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan

aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Cirebon. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappelitbangda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di DPMD tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. Akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak (412 desa dan 12 kelurahan), serta tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa-desa terutama di wilayah pembangunan Cirebon bagian timur.
2. Pengembangan dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa terutama yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lain masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk wilayah desa tersebut.

Adapun sebagai faktor pendorong dalam mendukung kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cirebon yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. *Budaya gotong royong masyarakat yang cukup besar terutama dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan program-program pemerintah dalam mengembangkan desa*
2. *Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program-program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.*

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama tiga tahun ke depan (2017-2019) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode Renstra dapat dilihat pada table 3.1, sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

- 1) *Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.*
- 2) *Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang didukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.*
- 3) *Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.*
- 4) *Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan provinsi.*

Strategi W-O

- 1) Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan provinsi.
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
- 3) *Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.*

Strategi S-T

- 1) SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
- 2) *Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.*

Strategi W-T

- 1) *Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.*
- 2) Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut : **"MEWUJUDKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEBAGAI MITRA DAN PEMANDU MASYARAKAT YG SINERGIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH)"**

Untuk memperjelas visi sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian terhadap variabel tersebut di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai mitra dan Pemandu masyarakat terkandung makna bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan segala kelebihan dan keunggulannya memposisikan diri (*positionery*) sebagai mitra masyarakat yang mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dengan lebih mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak menonjolkan perbedaan antara aparat dan

masyarakat, tetapi lebih bersifat sebagai katalis pembangunan yang mampu menghantarkan masyarakat kepada kondisi yang lebih baik.

Sinergis dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan pemerintahan desa mengandung makna bahwa aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menjadi aparat yang handal, profesional, dalam memfasilitasi, memberi arah, menggerakkan dan mendorong atau memotivasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan gerak dari seluruh pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan akademik sehingga mampu menjadikan masyarakat berdaya dalam menghadapi segala macam kegiatan dan menyelesaikan persoalan pembangunan dan kemasyarakatan serta Pemerintahan Desa.

Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera (AMANAHS) mengandung makna :

- Agamis** : Suatu kondisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang belandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumberdaya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna.
- Adil** : Suatu kondisi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Sinergi** : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan gerak dari seluruh pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan akademik.

Sejahtera : adalah kondisi terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tenteram.

Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai pemandu yang tangguh guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Sebagai pemandu di dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka terdapat harapan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2014-2019.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap

sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan masyarakat yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembangunan;
- 2) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- 3) Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumberdaya desa;
- 4) Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;
- 5) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa akan tercipta *suatu program secara terpadu dan menyeluruh.*

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka DPMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Cirebon yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat lainnya, peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Perumusan tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembangunan

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan
2. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat

Sasaran

1. Terlatihnya pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan di desa (LPMD, KPM, RT/RW, PKK, Posyandu)
2. Terbinanya Pokjanal Posyandu

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Tujuan

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat desa
2. Mengembangkan potensi BumDes dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya

Sasaran

1. Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Meningkatnya aset SPP eks PNPM-MPd
3. Meningkatnya penerapan TTG di desa

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan sumberdaya desa.

Tujuan

1. Meningkatkan pembangunan desa

Sasaran

1. Meningkatnya jumlah desa yang berstatus desa swasembada
2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan desa

Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD
2. Meningkatkan tertib tata kelola kekayaan dan keuangan desa
3. Membina kemandirian dan otonomi desa

Sasaran

1. Terlatihnya aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa
2. Terlatihnya aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
3. Meningkatnya jumlah desa mandiri

Misi Kelima : Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan pendamping desa dalam membina penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas kasi pemerintahan kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
2. Meningkatnya kapasitas kasi ekonomi dan pembangunan kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

desa

3. Meningkatnya kapasitas pendamping desa kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----------|---|---|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1 (2015) | 2 (2016) | 3 (2017) | 4 (2018) | 5 (2019) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Terlatihnya pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan di desa (LPMD, KPM, RT/RW, PKK, Posyandu) | Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| | Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta pengembangan sosial dan budaya masyarakat | Terbinanya Pokjanal Posyandu | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | 461 | 538 | 615 | 692 | 769 |
| | | | Meningkatnya jumlah Posyandu Mandiri | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| | | | Jumlah desa yang KPM nya dilatih | 42 | 252 | 50 | 34 | 34 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 69 | 160 | 61 | 61 | 61 |
| | | | Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih | 102 | 74 | 120 | 58 | 58 |
| 2 | Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat desa | Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Jumlah BumDes yang aktif | 47 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| | Mengembangkan potensi BumDes dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya | | Jumlah BumDes yang dilatih | 50 | 175 | 98 | 50 | 49 |
| | | Meningkatnya penerapan TTG di desa | Jumlah desa yang menerapkan TTG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Meningkatnya aset SPP dan UEP eks PNPM-MPd | Jumlah aset SPP dan UEP eks PNPM-MPd | 45 Milyar | 50 Milyar | 55 Milyar | 60 Milyar | 65 Milyar |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Meningkatkan pembangunan desa | Meningkatnya jumlah desa yang berstatus desa swasembada | Cakupan desa berstatus swasembada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD | Terlatihnya aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa | Jumlah kuwu yang mengikuti pelatihan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | Meningkatkan tertib tata kelola kekayaan dan keuangan desa | Terlatihnya aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | Jumlah Sekdes yang mengikuti pelatihan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | Membina kemandirian dan otonomi desa | Meningkatnya jumlah desa mandiri | Jumlah Bendahara Desa yang mengikuti pelatihan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | | | Jumlah pengurus/anggota BPD yang mengikuti pelatihan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|----|
| | | | Jumlah desa yang tepat waktu dalam penetapan Perdes dan APBDes | 115 | 206 | 136 | 0 | 0 |
| 5 | Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur kecamatan dan pendamping desa | Meningkatnya kapasitas kasi pemerintahan kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa | Jumlah kasi pemerintahan kecamatan yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | Meningkatnya kapasitas kasi ekonomi dan pembangunan kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa | Jumlah kasi ekbang kecamatan yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----|----|----|----|----|
| | | Meningkatnya kapasitas pendamping desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa | Jumlah pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|--|--|--|---|----|----|----|----|----|

4. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Strategi pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon dirumuskan untuk mencapai visi-misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan Dinas PMD tersebut terdiri dari :

- 1) Peningkatan kapasitas lembaga organisasi kemasyarakatan perdesaan, Peningkatan kualitas lembaga dan organisasi masyarakat di perdesaan diarahkan pada :
 - Peningkatan keterampilan dan kualitas lembaga, organisasi masyarakat di perdesaan
 - Peningkatan keterampilan masyarakat di bidang peran dan pengurus LPMD/ K .
 - Peningkatan pengetahuan dalam proses peran partisipatif pembangunan masyarakat desa
 - Peningkatan peran KPM dalam pembangunan .
 - Peningkatan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan adat dan budaya di pedesaan.
- 2) Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, adalah mengembangkan potensi usaha melalui badan usaha milik desa dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dalam peningkatan keterampilan masyarakat di pedesaan berupa pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi perdesaan diarahkan pada :

- Meningkatnya optimalisasi ketersediaan ruang untuk aktifitas ekonomi
- Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur perekonomian yang efisien serta sarana dan prasarana dasar perekonomian yang berkualitas.
- Peningkatan nilai tambah dan produktivitas produksi hasil pertanian, pengembangan, pendalaman struktur dan penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendukung infrastruktur industri.

- Pengembangan UKM yang mampu berdaya saing baik dipasar lokal maupun internasional.
- Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar *lokal dan regional*
- Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah serta memberikan kemitraan Usaha swasta serta mikro kecil dan menengah di perdesaan.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mencapai peningkatan pembangunan desa, potensi desa dan sumber daya desa/kelurahan yang berkualitas guna peran dan fungsi masyarakat desa *dalam rangka peningkatan pembangunan desa kelurahan* di segala bidang terutama menyangkut pembangunan prasarana dan lingkungan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka pembangunan secara berkelanjutan guna pengembangan kawasan perdesaan di pedesaan melalui data dasar keluarga, potensi desa, pemeliharaan hasil pembangunan dan optimalisasi sumber daya desa secara akurat dan optimal.

Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan diarahkan pada :

- *Penataan pembangunan desa/kelurahan yang didasari oleh prakarsa masyarakat di pedesaan*
- Peran partisipatif masyarakat dalam pengembangan pusat pertumbuhan antar desa
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan guna pusat kawasan terpadu perdesaan.
- Peningkatan pembangunan desa melalui data dasar keluarga, potensi desa dan tingkat perkembangan desa *diarahkan pada*
- Tercapainya peningkatan administrasi dan pembangunan desa.
- Tersusunnya buku profil desa secara benar dan berkelanjutan.

Peningkatan pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar lebih lestari dan berdaya guna diarahkan pada :

- Terfungsikannya unit pengelola lingkungan (UPL) di perdesaan
- Terbinanya unit pengelola sarana (UPS) dan kelompok pengguna sarana (KPS) *di pedesaan*
- Tergeraknya masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan.

Pengelolaan dan optimalisasi sumber daya desa melalui partisipasi dan analisis kawasan terpadu diarahkan pada :

- Terlaksananya perencanaan pembangunan partisipatif dalam musyawarah pembangunan masyarakat perdesaan
- Tercapainya peningkatan kemandirian TNI dan masyarakat dalam membangun desa
- Terkoordinirnya program penanggulangan kemiskinan antar OPD dan tercapainya efektivitas penyaluran raskin
- Tercapainya pertumbuhan pusat pengembangan perdesaan yang memiliki potensi andalan dan produk unggulan.

Penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya desa/kelurahan secara akurat dan optimal diarahkan pada :

- *Peningkatan hasil pembangunan desa baik fisik ,administrasi dalam perlombaan desa*
- *Peningkatan pembinaan pada desa/kelurahan yang berprestasi*

4) Peningkatan jumlah aparat desa yang terlatih dan berkualitas

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memenuhi fungsi pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang efektif.

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel tidaklah mudah karena berkaitan dengan seluruh stakeholders di Kabupaten Cirebon. Masyarakat sebagai pengawas diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut. Pemerintah selaku abdi masyarakat dapat menjalankan amanah masyarakat dengan tertib administrasi, tertib keuangan dan pertanggungjawaban. Diarahkan pada :

- *Peningkatan kuwu dan perangkat desa yang terlatih guna peningkatan kinerja aparatur pemerintahan untuk memenuhi fungsi pelayanan publik.*
- *Peningkatan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa dan bidang pengelolaan keuangan desa.*
- *Peningkatan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.*
- *Pembangunan dibidang kepegawaian pemerintahan desa dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah berupa*

pendidikan dan latihan, bimbingan rohani dan pemberian insentif berbasis kinerja.

Kebijakan

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

Aktivitas dan kreativitas lembaga desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa merupakan modal dasar untuk mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang merupakan Misi ke-3 Kabupaten Cirebon 2014-2019

2) Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang ekonomi untuk mendorong kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat .

Badan Usaha Milik Desa merupakan wadah pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komunitas) yang merupakan Misi ke-4 Kabupaten Cirebon 2014-2019

3) Menumbuhkan semangat inisiasi, kemandirian dan gotong royong dan partisipasi masyarakat

Aktivitas dan kreativitas lembaga desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa merupakan modal dasar untuk mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang merupakan Misi ke-3 Kabupaten Cirebon 2014-2019 .

4) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

Kapasitas aparatur desa/kelurahan yang berkualitas merupakan aspek yang sangat strategis guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merupakan Misi ke-6 Kabupaten Cirebon 2014-2019.

5) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa

Kapasitas aparatur kecamatan dan pendamping desa yang berkualitas merupakan aspek yang sangat strategis guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan kecamatan, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merupakan Misi ke-6 Kabupaten Cirebon 2014-2019.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon**

(lihat di Excel)

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program Dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2014) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit SKPD Penanggung | Lokasi | | |
|----|---|---|---|--------------------|--|--|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------|---|----|
| | | | | | | | | Tahun 1 | 2015 | Tahun 2 | 2016 | Tahun 3 | 2017 | Tahun 4 | 2018 | Tahun 5 | 2019 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target | Rp |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran | | | 2 07 2 07 01 01 01 | JUMLAH TOTAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya absensi dalam upaya dan pemberdayaan masyarakat dan desa | 620,565,000 | 6,204,882,230 | 9,798,738,000 | 10,242,269,000 | 12,642,793,100 | 14,446,833,100 | 16,987,833,100 | 53,737,153,518 | 3,928,555,000 | | | | | | |
| | | | | | Kematan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsi alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsi alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 187,690,000 | 187,690,000 | 187,690,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 936,380,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,600,000 | 7,900,000 | 8,000,000 | 8,360,000 | 39,040,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 22,500,000 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | 132,500,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 27,000,000 | 27,000,000 | 29,500,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | 35,000,000 | 154,500,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsi alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsi alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 1,250,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 15,750,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | |
| | | Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 07 2 07 01 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input : Jumlah dana Output : Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun Outcome : Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran | 259,685,000 | 259,685,000 | 250,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 230,000,000 | 1,149,685,000 | | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | |

| | |
|---|--|
| 3 | Kategori : Kategori |
|---|--|

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----|----|----|----|------------------------------|---|-----|------|-------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-------------|---------------|-----|------|---------------|------|--------------|
| 8 | D) Mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| 9 | D) Mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| 10 | D) Mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Terdapatnya kader dan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 2 | 07 | 01 | 15 | 06 | Fasilitasi Pengkajian TP-PKK | Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya kegiatan TP-PKK di setiap 10 program PKC | 424 | 100% | 886,340,000 | 571,734,000 | 722,660,000 | 424 | 100% | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 424 | 100% | 4,153,994,000 | DPMD | Kab. Cirebon |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|----|-----------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----|------|---|------|-------------|------|--------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 9 | (1) Mengajukan pembangunan desa (2) Mengembangkan potensi dan sumber daya desa | Terdahyanya peka PHN-HPD | Meningkatnya jumlah aset SPK dan LEP PHN-HPD | 2 | 07 | 2 | 07 | 01 | 16 | 08 | Adminisrasi Proyek PHN Mandiri | 32 | Milyar (Rupiah) | 933,124,400 | 340,109,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100% | 0 | 100% | 340,109,250 | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Input : Jumlah desa | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebanyak 11 (sebelas) Program, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Sektor
7. Program Peningkatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

Program Lintas SKPD

- Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Sektor
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

Program Lintas Kewilayahan

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Rencana Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | 2015-2019 | Urusan |
|----|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 620,565,000 | 623,910,000 | 571,220,000 | 587,000,000 | 625,860,000 | 3,028,555,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| 1) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187,690,000 | 187,690,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 936,380,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 7,200,000 | 7,600,000 | 7,900,000 | 8,000,000 | 8,360,000 | 39,060,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | 132,500,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27,000,000 | 29,500,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | 35,000,000 | 154,500,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 1,250,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 15,750,000 | Non Urusan |
| 6) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 259,685,000 | 250,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 230,000,000 | 1,149,685,000 | Non Urusan |
| 7) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18,120,000 | 18,480,000 | 18,700,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | 95,300,000 | Non Urusan |
| 8) | Penyediaan Makanan dan Minuman | 30,140,000 | 30,140,000 | 30,140,000 | 31,000,000 | 35,000,000 | 156,420,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 9) | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 66,980,000 | 73,000,000 | 66,980,000 | 67,000,000 | 75,000,000 | 348,960,000 | Non Urusan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : | 535,271,000 | 431,614,000 | 245,000,000 | 273,000,000 | 551,500,000 | 2,036,385,000 | |
| 1) | Pembangunan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 275,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,400,000 | Non Urusan |
| 3) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 109,357,000 | 125,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 | 145,000,000 | 631,357,000 | Non Urusan |
| 4) | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,000,000 | 21,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 102,564,000 | 102,564,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 127,000,000 | 557,128,000 | Non Urusan |
| 6) | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10,800,000 | 14,050,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 18,500,000 | 74,350,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 7) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 37,150,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 477,150,000 | Non Urusan |
| 3 | Program Peningkatan disiplin Aparatur | 28,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 71,235,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| 1) | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 23,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 66,235,000 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | Non Urusan |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bid.Kepegawaian dan pemerintahan | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | Non Urusan |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 64,256,000 | 71,512,000 | 77,000,000 | 84,000,000 | 92,000,000 | 388,768,000 | |

| | Kegiatan : | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 76,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 7,756,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 49,012,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 5,000,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 46,256,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyusunan pelaporan capaian Program dan kegiatan Triwulanan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 79,500,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyusunan Laporan tahunan Badan | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | 53,500,000 | Non Urusan |
| 6) | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 19,000,000 | 84,500,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan sektoral | 33,000,000 | 70,000,000 | 56,000,000 | 78,500,000 | 88,000,000 | 325,500,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) Dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) | 12,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | 192,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)SKPD | 11,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | 79,500,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan Pembuatan Profil Badan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 54,000,000 | Non Urusan |
| 7 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1,320,980,636 | 2,791,795,000 | 2,907,150,000 | 3,431,800,000 | 3,900,000,000 | 14,351,725,636 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| | Orientasi pengurus LPMD/K | 104,853,000 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | 494,853,000 | Urusan Wajib |
| | Fasilitasi Penguatan TP.PKK | 571,734,000 | 722,660,000 | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | 4,152,994,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu | 118,010,036 | 490,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 | 2,433,010,036 | Urusan Wajib |
| | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 242,693,900 | 240,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 1,262,693,900 | Urusan Wajib |
| | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | 58,085,000 | 390,000,000 | 195,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | 1,468,085,000 | Urusan Wajib |
| | Pelatihan P3MD | 110,420,700 | 230,000,000 | 300,000,000 | 390,000,000 | 450,000,000 | 1,480,420,700 | Urusan Wajib |
| | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT/RW | 115,184,000 | 329,135,000 | 350,000,000 | 490,000,000 | 550,000,000 | 1,834,319,000 | Urusan Wajib |
| | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K | 0 | 0 | 380,350,000 | 395,000,000 | 450,000,000 | 1,225,350,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 910,191,100 | 1,611,654,000 | 2,317,916,100 | 3,165,916,100 | 3,797,916,100 | 11,803,593,400 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | |
| | Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (BUMDES) | 73,615,000 | 390,000,000 | 750,000,000 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 | 4,013,615,000 | Urusan Wajib |
| | Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | 251,866,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,866,850 | Urusan Wajib |
| | Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan, untuk 22 UPK, 22-BP-UPK,22 BKAD | 340,109,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,109,250 | Urusan Wajib |
| | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, bentuk Partisipasi Tk. Provinsi dan Nasional | 100,000,000 | 240,800,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 | 1,640,800,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal | 74,600,000 | 180,000,000 | 200,000,000 | 298,000,000 | 420,000,000 | 1,172,600,000 | Urusan Wajib |
| | Pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan keterampilan masyarakat | 0 | 450,854,000 | 497,916,100 | 497,916,100 | 497,916,100 | 1,944,602,300 | Urusan Wajib |
| | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 290,000,000 | Urusan Wajib |
| | Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPd | 0 | 350,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | 2,150,000,000 | Urusan Wajib |
| 9 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 640,210,522 | 1,540,000,000 | 1,173,034,960 | 1,605,000,000 | 1,860,000,000 | 6,818,245,482 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | |
| | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | 0 | 260,000,000 | 134,000,000 | 0 | 0 | 394,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | 60,894,800 | 230,000,000 | 112,182,400 | 350,000,000 | 400,000,000 | 1,153,077,200 | Urusan Wajib |
| | Fasiltasi TMMD dan BSMSS | 203,368,272 | 450,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 1,253,368,272 | Urusan Wajib |
| | Penyelenggaraan Perlombaan Desa | 227,081,250 | 450,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 | 550,000,000 | 2,222,081,250 | Urusan Wajib |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | 148,866,200 | 150,000,000 | 165,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | 1,088,866,200 | Urusan Wajib |
| | Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 116,852,560 | 130,000,000 | 145,000,000 | 391,852,560 | Urusan Wajib |
| | Fasilitasi Penataan Batas Desa | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 165,000,000 | 315,000,000 | Urusan Wajib |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 1,894,432,000 | 2,410,962,000 | 2,726,872,000 | 2,310,000,000 | 2,798,000,000 | 12,140,266,000 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | 153,832,000 | 350,000,000 | 275,000,000 | 500,000,000 | 650,000,000 | 1,928,832,000 | Urusan Wajib |
| | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa | 700,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 828,000,000 | 3,688,000,000 | Urusan Wajib |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu | 116,980,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 266,980,000 | Urusan Wajib |
| | Penyusunan profil desa/kel. | 189,000,000 | 207,900,000 | 249,890,000 | 250,000,000 | 265,000,000 | 1,161,790,000 | Urusan Wajib |
| | Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 175,720,000 | 500,000,000 | 356,982,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | 2,032,702,000 | Urusan Wajib |
| | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa | 26,000,000 | 142,393,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 318,393,000 | Urusan Wajib |
| | Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu | 350,000,000 | 0 | 385,000,000 | 0 | 0 | 735,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | 107,900,000 | 385,169,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 330,000,000 | 1,223,069,000 | Urusan Wajib |
| | Fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan | 0 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | 255,000,000 | Urusan Wajib |
| | Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih | 75,000,000 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | Urusan Wajib |
| | Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa | 0 | 55,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 280,500,000 | Urusan Wajib |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 787,880,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | |
| | Forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 787,880,000 | Urusan Wajib |

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 0 | 160 | 252 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2 | Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 3 | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | 384 | 461 | 538 | 615 | 692 | 769 | 769 |
| 4 | Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 5 | Jumlah desa yang KPM nya dilatih | 184 | 42 | 252 | 50 | 34 | 34 | 412 |
| 6 | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 188 | 69 | 160 | 61 | 61 | 61 | 412 |
| 7 | Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih | 184 | 102 | 74 | 120 | 58 | 58 | 412 |
| 8 | Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih | 0 | 0 | 0 | 190 | 117 | 117 | 424 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | Jumlah BUMDes yang aktif | 31 | 50 | 175 | 96 | 45 | 46 | 412 |
| 10 | Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP PNPM-MPD | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | Jumlah desa yang menerapkan TTG | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina | 0 | 40 | 18 | 20 | 20 | 20 | 118 |
| 14 | Jumlah desa yang kelompok usaha ekonomi produktifnya dilatih | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 15 | Jumlah desa yang memiliki posyantek | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Jumlah aset SPP dan UEP eks PNPM-MPd | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 17 | Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 412 |
| 18 | Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes | 270 | 68 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 19 | Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 21 | Jumlah desa yang difasilitasi | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 22 | Jumlah desa/kel yang dibina | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 23 | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | |
| 24 | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 25 | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 235 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 26 | Jumlah desa yang dimonev | 10 | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 242 |
| 27 | Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel | 0 | 80 | 80 | 40 | 112 | 112 | 424 |
| 28 | Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih | 0 | 80 | 120 | 30 | 88 | 94 | 412 |
| 29 | Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes | 0 | 115 | 145 | 152 | 0 | 0 | 412 |
| 30 | Jumlah desa yang ikut pembekalan | 0 | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 242 |
| 31 | Jumlah desa yang dimonev | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 32 | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 33 | Jumlah kuwu yang dilantik | 0 | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 242 |
| 34 | Jumlah Raperbup yang dievaluasi | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 35 | Jumlah aparatur kecamatan yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

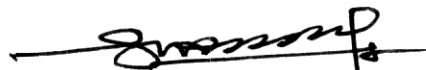
BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi Dinas PMD dan program kerja Dinas PMD yang merujuk kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RENSTRA ini akan bermanfaat manakala seluruh Stakeholder pembangunan mempunyai Visi yang sinergis dengan Visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas PMD adalah sebagai mitra dan pemandu masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat ***Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera (AMANA).***

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ini, tentunya masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR , SERI

LAMPIRAN-LAMPIRAN RENSTRA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

| No | Program Dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2014) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BPMPD | | Unit SKPD Penang gung tahun | Lokasi |
|----|---|--|--|---|---------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | K | Rp | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | 6,204,482,258 | | 9,758,758,000 | | 10,242,269,060 | | 11,853,792,100 | | 14,057,852,100 | | 52,117,153,518 | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 620,565,000 | | 620,565,000 | | 623,910,000 | | 571,220,000 | | 587,000,000 | | 625,860,000 | | 3,028,555,000 | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input : Jumlah dana | 187,690,000 | | 187,690,000 | | 187,690,000 | | 187,000,000 | | 187,000,000 | | 187,000,000 | | 936,380,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsi inya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun | 5 | Rekening | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | Rekening | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 5 | Rekening | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | Rekening | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | Input : Jumlah dana | 7,200,000 | | 7,200,000 | | 7,600,000 | | 7,900,000 | | 8,000,000 | | 8,360,000 | | 39,060,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut | 22 | Unit | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | 22 | Unit | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 22 | Unit | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | 22 | Unit | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-------|---------------|------|--------------|
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input | : Jumlah dana | | 22,500,000 | | 22,500,000 | | 25,000,000 | | 27,000,000 | | 28,000,000 | | 30,000,000 | | 132,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 47 | Jenis | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | Jenis | | | |
| | Outcome | : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 47 | Jenis | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | Jenis | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input | : Jumlah dana | | 27,000,000 | | 27,000,000 | | 29,500,000 | | 30,000,000 | | 33,000,000 | | 35,000,000 | | 154,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 22 | Jenis | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | Jenis | | | |
| | Outcome | : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 22 | Jenis | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | Jenis | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Input | : Jumlah dana | | 1,250,000 | | 1,250,000 | | 2,500,000 | | 3,500,000 | | 4,000,000 | | 4,500,000 | | 15,750,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 12 | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Bulan | | | |
| | Outcome | : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 12 | Bulan | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Bulan | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Input | : Jumlah dana | | 259,685,000 | | 259,685,000 | | 250,000,000 | | 200,000,000 | | 210,000,000 | | 230,000,000 | | 1,149,685,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 20 | Jenis | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | Jenis | | | |
| | Outcome | : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 20 | Jenis | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | Jenis | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|---------------|------|--------------|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Input : Jumlah dana | | 18,120,000 | | 18,120,000 | | 18,480,000 | | 18,700,000 | | 19,000,000 | | 21,000,000 | | 95,300,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 3 | Media | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Media | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 3 | Media | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Media | | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Input : Jumlah dana | | 30,140,000 | | 30,140,000 | | 30,140,000 | | 30,140,000 | | 31,000,000 | | 35,000,000 | | 156,420,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 250 | Orang | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | Orang | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 250 | Orang | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | Orang | | | |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Input : Jumlah dana | | 66,980,000 | | 66,980,000 | | 73,000,000 | | 66,980,000 | | 67,000,000 | | 75,000,000 | | 348,960,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 154 | Kali | 154 | | 154 | | 154 | | 154 | | 154 | | Kali | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 154 | Kali | 154 | | 154 | | 154 | | 154 | | 154 | | Kali | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | 535,271,000 | | 535,271,000 | | 431,614,000 | | 245,000,000 | | 273,000,000 | | 551,500,000 | | 2,036,385,000 | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Gedung Kantor | Input : Jumlah dana | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terlaksananya pembangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 0 | Kegiatan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Kegiatan | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 0 | Kegiatan | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Kegiatan | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|------|--------------|
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Input : Jumlah dana | | 10,800,000 | | 10,800,000 | | 14,050,000 | | 15,000,000 | | 16,000,000 | | 18,500,000 | | 74,350,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 4 | Jenis | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | Jenis | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 4 | Jenis | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | Jenis | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Input : Jumlah dana | | 37,150,000 | | 37,150,000 | | 190,000,000 | | 0 | | 0 | | 250,000,000 | | 477,150,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Kegiatan | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | Kegiatan | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 1 | Kegiatan | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | Kegiatan | | |
| 3 | Program Peningkatan disiplin Aparatur | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | 23,635,000 | | 28,000,000 | | 9,735,000 | | 10,500,000 | | 11,000,000 | | 12,000,000 | | 71,235,000 | | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Input : Jumlah dana | | 23,635,000 | | 23,000,000 | | 9,735,000 | | 10,500,000 | | 11,000,000 | | 12,000,000 | | 66,235,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 2 | Jenis | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | Jenis | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 2 | Jenis | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | Jenis | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---|---|---|---------|------------|------|--------------|
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Input : Jumlah dana | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Terpenuhiya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai BPMPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 0 | Jenis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jenis | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 0 | Jenis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jenis | | | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | 0 | 40,000,000 | | | | | | 0 | | | 40,000,000 | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bid.Kepegawaian dan pemerintahan | Input : Jumlah dana | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 0 | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dokumen | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan. | 0 | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dokumen | | | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | 64,255,500 | 64,256,000 | 71,512,000 | 77,000,000 | 84,000,000 | 92,000,000 | 388,768,000 | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input : Jumlah dana | 11,500,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | 76,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon | | | | | | | |
| | | Output : Tersusunnya dokumen LKPD, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 3 | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dokumen | | | |
| | | Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai DPMD yang terukur dalam tertib administrasi penyusunan LKPD, LPPD dan LAKIP sebagai wujud pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 (satu) tahun. | 3 | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dokumen | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|------|--------------|
| | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Input : Jumlah dana | | 7,755,500 | | 7,756,000 | | 7,756,000 | | 10,500,000 | | 11,000,000 | | 12,000,000 | | 49,012,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | | Outcome : Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan semesteran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Input : Jumlah dana | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 7,756,000 | | 10,500,000 | | 11,000,000 | | 12,000,000 | | 46,256,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | | Outcome : Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan akhir tahun selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | Penyusunan pelaporan capaian Program dan kegiatan Triwulanan | Input : Jumlah dana | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 16,500,000 | | 18,000,000 | | 79,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 4 | Dokumen | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | Dokumen | | |
| | | Outcome : Meningkatnya akuntabilitas laporan capaian program dan kegiatan triwulan selama 1 (satu) tahun | 4 | Dokumen | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | Dokumen | | |
| | Penyusunan Laporan tahunan dinas | Input : Jumlah dana | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 11,500,000 | | 13,000,000 | | 53,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | | Outcome : meningkatnya akuntabilitas laporan tahunan dinas selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas | Input : Jumlah dana | | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 17,500,000 | | 19,000,000 | | 84,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 2 | Dokumen | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | Dokumen | | |
| | | Outcome : Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama 1 (satu) tahun | 2 | Dokumen | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | Dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---------|---|------------|---|--|------------|--|---|------------|---|--|------------|--|---|------------|--|--|------------|--|--|-------------|------|--------------|
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan sektoral | | : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 33,000,000 | | | 33,000,000 | | | 70,000,000 | | | 56,000,000 | | | 78,500,000 | | | 88,000,000 | | | 325,500,000 | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) Dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) | Input | : Jumlah dana | | | 12,000,000 | | | 12,000,000 | | | 45,000,000 | | | 30,000,000 | | | 50,000,000 | | | 55,000,000 | | | 192,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| Output | | : Tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 3 | Dokumen | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | Dokumen | | | | | | | | |
| Outcome | | : Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral selama 1 (satu) tahun | 3 | Dokumen | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | Dokumen | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)SKPD | Input | : Jumlah dana | | | 11,000,000 | | | 11,000,000 | | | 15,000,000 | | | 16,000,000 | | | 17,500,000 | | | 20,000,000 | | | 79,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| Output | | : Tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | | | | | | | |
| Outcome | | : Meningkatnya akuntabilitas penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | | | | | | | |
| | Penyusunan Pembuatan Profil Dinas | Input | : Jumlah dana | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 11,000,000 | | | 13,000,000 | | | 54,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| Output | | : Tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | | | | | | | |
| Outcome | | : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas dalam bentuk akurasi data dan profil dinas selama 1 (satu) tahun | 1 | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Dokumen | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------|----------------|
| 7 Misi ke 2 : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan Misi ke 4 : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | | : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan | | | | 1,320,980,636 | | 2,791,795,000 | | 2,907,150,000 | | 3,431,800,000 | | 3,900,000,000 | | 14,351,725,636 |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orientasi pengurus LPMD/K | Input | : Jumlah dana | | 0 | | 104,853,000 | | 390,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 494,853,000 |
| | Output | : Terlatihnya pengurus/anggota LPMD | 0 Desa | 160 | | 252 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 412 Desa | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 0 Desa | 160 | | 252 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 412 Desa | |
| Fasilitasi Penguatan TP.PKK | Input | : Jumlah dana | | 886,340,000 | | 571,734,000 | | 722,660,000 | | 921,800,000 | | 921,800,000 | | 1,015,000,000 | | 4,152,994,000 |
| | Output | : Terlatihnya kader dan TP.PKK disetiap tingkatan | 424 TP.PKK Desa/Kel. | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | TP.PKK Desa/Kel. | |
| | Outcome | : Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dim melaksanakan kegiatan 10 program PKK | 424 TP.PKK Desa/Kel. | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | TP.PKK Desa/Kel. | |
| Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu | Input | : Jumlah dana | | 191,517,000 | | 118,010,036 | | 490,000,000 | | 500,000,000 | | 600,000,000 | | 725,000,000 | | 2,433,010,036 |
| | Output | : Terbinanya Pokjanal Posyandu | 2,520 Posyandu (total 2.520 Posyandu) | 2,558 | | 2,591 | | 2,591 | | 2,591 | | 2,591 | | 2,591 | Posyandu (total 2.591 Posyandu) | |
| | Outcome | : Meningkatkan jumlah Posyandu Purnama | 384 Posyandu (total 2.520 Posyandu) | 461 | | 538 | | 615 | | 692 | | 769 | | 769 | Posyandu (total 2.591 Posyandu) | |
| Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BOROM) | Input | : Jumlah dana | | 122,550,000 | | 242,693,900 | | 240,000,000 | | 260,000,000 | | 260,000,000 | | 260,000,000 | | 1,262,693,900 |
| | Output | : Terfasilitasinya kegiatan BBGRM dalam membangun desa/kelurahan | 424 Desa/Kel. | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | Desa/Kel. | |
| | Outcome | : Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM | 424 Desa/Kel. | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 | Desa/Kel. | |
| Pelatihan Kader Pemberdaya an Masyarakat (KPM) | Input | : Jumlah dana | | 116,388,000 | | 58,085,000 | | 390,000,000 | | 195,000,000 | | 375,000,000 | | 450,000,000 | | 1,468,085,000 |
| | Output | : Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat | 184 Desa | 42 | | 252 | | 50 | | 34 | | 34 | | 34 | 412 Desa | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang KPM nya dilatih | 184 Desa | 42 | | 252 | | 50 | | 34 | | 34 | | 34 | 412 Desa | |
| Pelatihan P3MD | Input | : Jumlah dana | | 178,000,000 | | 110,420,700 | | 230,000,000 | | 300,000,000 | | 390,000,000 | | 450,000,000 | | 1,480,420,700 |
| | Output | : Terlatihnya pengurus/anggota (PKK, LPMD/K,RT,RW,Tokoh Pemuda dan masyarakat) | 188 Desa | 69 | | 160 | | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | 412 Desa | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 188 Desa | 69 | | 160 | | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | 412 Desa | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----------------|------|------------------|--|
| Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT/RW | Input | : Jumlah dana | | 98,755,000 | | 115,184,000 | | 329,135,000 | | 350,000,000 | | 490,000,000 | | 550,000,000 | | 1,834,319,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlatihnya pengurus RT/RW | 184 | Desa | 102 | | 74 | | 120 | | 58 | | 58 | | 412 | Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih (Jumlah total RW 2.717, RT 9.355, Dusun 1.467 per 2016) | 184 | Desa | 102 | | 74 | | 120 | | 58 | | 58 | | 412 | Desa | | | |
| Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K | Input | : Jumlah dana | | 0 | | 0 | | 0 | | 380,350,000 | | 395,000,000 | | 450,000,000 | | 1,225,350,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlatihnya pengurus/anggota LPMD/K | 0 | Desa /Kel. | 0 | | 0 | | 190 | | 117 | | 117 | | 424 | Desa /kel | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih | 0 | Desa /Kel. | 0 | | 0 | | 190 | | 117 | | 117 | | 424 | Desa /kel | | | |
| 8 | Misi ke 5 : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tenteram | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | : Meningkatkan perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bumdes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat | | | | 910,191,100 | | 1,611,654,000 | | 2,317,916,100 | | 3,165,916,100 | | 3,797,916,100 | | 11,803,593,400 | | | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (BUMDES) | Input | : Jumlah dana | | 129,650,000 | | 73,615,000 | | 390,000,000 | | 750,000,000 | | 1,300,000,000 | | 1,500,000,000 | | 4,013,615,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 150 | Bumdes | 50 | | 175 | | 96 | | 45 | | 46 | | 412 | Bumdes | | | |
| | Outcome | : Jumlah BUMDes yang aktif | 31 | Bumdes | 47 | | 30 | | 40 | | 40 | | 40 | | 197 | Bumdes | | | |
| Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | Input | : Jumlah dana | | 304,872,600 | | 251,866,850 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 251,866,850 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlatihnya kelompok usaha industri kerajinan | 25 | Desa | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 26 | Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih | 25 | Desa | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | Desa | | | |
| Administrasi Proyek PNPB Mandiri Perdesaan, untuk 22 UPK, 22-BP-UPK, 22 BKAD | Input | : Jumlah dana | | 933,121,400 | | 340,109,250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 340,109,250 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Jumlah aset SPP PNPB-MPD | 32 | Rupiah (milyar) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 | Rupiah (milyar) | | | |
| | Outcome | : Meningkatnya jumlah aset SPP PNPB-MPD | 32 | Rupiah (milyar) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 | Rupiah (milyar) | | | |
| Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, bentuk Partisipasi Tk. Propinsi dan Nasional | Input | : Jumlah dana | | 115,000,000 | | 100,000,000 | | 240,800,000 | | 350,000,000 | | 400,000,000 | | 550,000,000 | | 1,640,800,000 | DPMD | Provinsi Cirebon | |
| | Output | : Meningkatnya penerapan TTG di desa | 2 | Desa | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang menerapkan TTG | 2 | Desa | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | Desa | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|--------------|
| Pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal | Input : Jumlah dana | 0 | | 74,600,000 | | 180,000,000 | | 200,000,000 | | 298,000,000 | | 420,000,000 | | 1,172,600,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output : terbinanya kelompok usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal | 0 | Desa | 40 | | 18 | | 20 | | 20 | | 20 | | 118 | Desa | |
| | Outcome : Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina | 0 | Desa | 40 | | 18 | | 20 | | 20 | | 20 | | 118 | Desa | |
| Pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan keterampilan masyarakat | Input : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 450,854,000 | | 497,916,100 | | 497,916,100 | | 497,916,100 | | 1,944,602,300 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output : Terlatihnya kelompok usaha ekonomi produktif | 0 | Desa | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 320 | Desa | |
| | Outcome : Jumlah desa yang kelompok usaha ekonomi produktifnya dilatih | 0 | Desa | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 320 | Desa | |
| Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | Input : Jumlah dana | 0 | | 70,000,000 | | 0 | | 70,000,000 | | 70,000,000 | | 80,000,000 | | 290,000,000 | Banprov | Kab. Cirebon |
| | Output : Terlaksananya revitalisasi Posyantek | 0 | Desa | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | Desa | |
| | Outcome : Jumlah desa yang memiliki posyantek | 0 | Desa | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | Desa | |
| Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPD | Input : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 350,000,000 | | 450,000,000 | | 600,000,000 | | 750,000,000 | | 2,150,000,000 | | Kab. Cirebon |
| | Output : Jumlah aset SPP eks PNPM-MPd | 0 | Rupiah (milyar) | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 65 | Rupiah (milyar) | |
| | Outcome : Meningkatnya jumlah aset SPP eks PNPM-MPD | 0 | Rupiah (milyar) | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 65 | Rupiah (milyar) | |
| 9 Misi ke 3 : Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | Meningkatnya pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa | | 640,210,522 | | 1,540,000,000 | | 1,173,034,960 | | 1,755,000,000 | | 2,035,000,000 | | 6,424,245,482 | | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | Input : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 260,000,000 | | 134,000,000 | | 150,000,000 | | 175,000,000 | | 719,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output : Terbinanya kelompok masyarakat utk berpartisipasi dalam pembangunan desa | 0 | Desa | 0 | | 412 | | 412 | | 0 | | 0 | | 412 | Desa | |
| | Outcome : Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina | 0 | Desa | 0 | | 412 | | 412 | | 0 | | 0 | | 412 | Desa | |
| Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Input : Jumlah dana | 75,000,000 | | 60,894,800 | | 230,000,000 | | 112,182,400 | | 350,000,000 | | 400,000,000 | | 1,153,077,200 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output : Terselenggaranya musyawarah pembangunan desa | 270 | Desa | 68 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | Desa | |
| | Outcome : Jumlah desa yg tepat waktu menyusun APBDes dan RKPDdes | 270 | Desa | 68 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | Desa | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|------|--------------|
| Fasilitasi TMMD dan BSMSS | Input | : Jumlah dana | 250,000,000 | | 203,368,272 | | 450,000,000 | | 150,000,000 | | 200,000,000 | | 250,000,000 | | 1,253,368,272 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Terlaksananya kegiatan TMMD dan BSMSS | 2 Desa | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | 2 Desa | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 Desa | | | |
| Penyelenggaraan Perlombaan Desa | Input | : Jumlah dana | 384,290,000 | | 227,081,250 | | 450,000,000 | | 495,000,000 | | 500,000,000 | | 550,000,000 | | 2,222,081,250 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : terlaksananya kegiatan lomba desa Tk.Kab. dan Tk.Prov. | 412 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | 7 Desa | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 35 Desa | | | |
| Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan | Input | : Jumlah dana | 132,500,000 | | 148,866,200 | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 275,000,000 | | 350,000,000 | | 1,088,866,200 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa | 412 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang difasilitasi | 412 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan | Input | : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 0 | | 116,852,560 | | 130,000,000 | | 145,000,000 | | 391,852,560 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Terbinanya desa/kelurahan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan | 0 Desa/Kel. | 0 | | 0 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 Desa/Kel. | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa/kel yang dibina | 0 Desa/Kel. | 0 | | 0 | | 424 | | 424 | | 424 | | 424 Desa/Kel. | | | |
| Fasilitasi Penataan Batas Desa | Input | : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 150,000,000 | | 165,000,000 | | 315,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | Output | : Terfasilitasinya penataan batas-batas desa | 0 Desa/Kel. | 0 | | 0 | | 0 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang difasilitasi | 0 Desa/Kel. | 0 | | 0 | | 0 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| 10 | Misi ke 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | : Meningkatkan kapasitas aparatur pemdes yg bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | | | 1,894,432,000 | | 2,410,962,000 | | 2,726,872,000 | | 2,310,000,000 | | 2,798,000,000 | | 12,140,266,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Input | : Jumlah dana | 154,340,000 | | 153,832,000 | | 350,000,000 | | 275,000,000 | | 500,000,000 | | 650,000,000 | | 1,928,832,000 | DPMD | Kab. |
| | Output | : Terlatihnya aparatur desa mengenal pengelolaan keuangan desa | 412 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 412 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|------|--------------|--|
| Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa | Input | : Jumlah dana | 835,260,000 | | 700,000,000 | | 720,000,000 | | 720,000,000 | | 720,000,000 | | 828,000,000 | | 3,688,000,000 | DPMD | Kab. | |
| | Output | : Terlatihnya aparat desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 235 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 25 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu | Input | : Jumlah dana | 12,052,000 | | 116,980,000 | | 0 | | 150,000,000 | | 0 | | 0 | | 266,980,000 | DPMD | Kab. | |
| | Output | : Terevaluasinya pelaporan tentang fasiltasi pemilihan kuwu | 10 Desa | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang dimonev | 10 Desa | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 Desa | | | | |
| Penyusunan profil desa/kel. | Input | : Jumlah dana | 0 | | 189,000,000 | | 207,900,000 | | 249,890,000 | | 250,000,000 | | 265,000,000 | | 1,161,790,000 | | | |
| | Output | : Tersusunnya profil desa/kelurahan | 0 Desa/Kel | 80 | | 80 | | 40 | | 112 | | 112 | | 424 Desa /Kel | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel | 0 Desa/Kel | 80 | | 80 | | 40 | | 112 | | 112 | | 424 Desa /Kel | | | | |
| Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Input | : Jumlah dana | 0 | | 175,720,000 | | 500,000,000 | | 356,982,000 | | 450,000,000 | | 550,000,000 | | 2,032,702,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlatihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 0 Desa | 80 | | 120 | | 30 | | 88 | | 94 | | 412 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah anggota BPD yang dilatih | 0 Desa | 80 | | 120 | | 30 | | 88 | | 94 | | 412 Desa | | | | |
| Pelatihan aparat pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa | Input | : Jumlah dana | 0 | | 26,000,000 | | 142,393,000 | | 150,000,000 | | 0 | | 0 | | 318,393,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa | 0 Desa | 115 | | 145 | | 152 | | 0 | | 0 | | 412 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes | 0 Desa | 115 | | 145 | | 152 | | 0 | | 0 | | 412 Desa | | | | |
| Pembekalan persiapan penyelenggaran pemilihan kuwu | Input | : Jumlah dana | 0 | | 350,000,000 | | 0 | | 385,000,000 | | 0 | | 0 | | 735,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terbekalinya desa dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu | 0 Desa | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang ikut pembekalan | 0 Desa | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 Desa | | | | |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Input | : Jumlah dana | 0 | | 107,900,000 | | 385,169,000 | | 150,000,000 | | 250,000,000 | | 330,000,000 | | 1,223,069,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | 0 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang dimonev | 0 Desa | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |
| Fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan | Input | : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 65,000,000 | | 85,000,000 | | 255,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon | |
| | Output | : Terfasilitasinya penyelesaian masalah kedesaan | 0 Desa | 0 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |
| | Outcome | : Jumlah desa yang difasilitasi | 0 Desa | 0 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 | | 412 Desa | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|------|--------------|
| | Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih | Input : Jumlah dana | 0 | | 75,000,000 | | 0 | | 175,000,000 | | 0 | | 0 | | 250,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon | | |
| | | Output : Terlaksananya pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih | 0 | Kuwu | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 | Kuwu | | | |
| | | Outcome : Jumlah kuwu yang dilantik | 0 | Kuwu | 124 | | 0 | | 118 | | 0 | | 0 | | 242 | Kuwu | | | |
| | Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa | Input : Jumlah dana | 0 | | 0 | | 55,500,000 | | 60,000,000 | | 75,000,000 | | 90,000,000 | | 280,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon | | |
| | | Output : Terevaluasinya penerapan Perbup ttg pemerintah desa | 0 | Raperbup | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | Raperbup | | | |
| | | Outcome : Jumlah Raperbup yang dievaluasi | 0 | Raperbup | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | Raperbup | | | |
| 11 | Misi ke 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | | : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kec. yg bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | | | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 787,880,000 | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan | Input : Jumlah dana | 0 | | | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 157,576,000 | | 787,880,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output : Meningkatkan kapasitas kasi pemerintahan kecamatan dan pendamping desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa | 0 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 600 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | | | |
| | | Outcome : Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 0 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 600 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | | | |

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Target (%) | | | | | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | Urusan |
|----|---|---|------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 620,565,000 | 623,910,000 | 571,220,000 | 587,000,000 | 625,860,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 187,690,000 | 187,690,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,200,000 | 7,600,000 | 7,900,000 | 8,000,000 | 8,360,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27,000,000 | 29,500,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | 35,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,250,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | Non Urusan |
| 6) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 259,685,000 | 250,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 230,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18,120,000 | 18,480,000 | 18,700,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | Non Urusan |
| 8) | Penyediaan Makanan dan Minuman | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,140,000 | 30,140,000 | 30,140,000 | 31,000,000 | 35,000,000 | Non Urusan |
| 9) | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,980,000 | 73,000,000 | 66,980,000 | 67,000,000 | 75,000,000 | Non Urusan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 535,271,000 | 431,614,000 | 245,000,000 | 273,000,000 | 551,500,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pembangunan Gedung Kantor | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 3) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109,357,000 | 125,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 | 145,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102,564,000 | 102,564,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 127,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 6) | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,800,000 | 14,050,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 18,500,000 | Non Urusan |
| 7) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 37,150,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | Non Urusan |
| 3 | Program Peningkatan disiplin Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 28,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Meningkatkan kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bid.Kepegawaian dan pemerintahan | meningkatkan kinerja pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 97,256,000 | 141,512,000 | 133,000,000 | 162,500,000 | 180,000,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | meningkatkan kinerja pegawai DPMD yang terukur dalam tertib administrasi penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP sebagai wujud pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 (satu) tahun. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2) | Penyusunan laporan keuangan semesteran | meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan semesteran selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,756,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan akhir tahun selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,000,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyusunan pelaporan capaian Program dan kegiatan Triwulanan | meningkatkan akuntabilitas laporan capaian program dan kegiatan triwulan selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyusunan Laporan tahunan dinas | meningkatkan akuntabilitas laporan tahunan dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | Non Urusan |
| 6) | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan dinas | meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 19,000,000 | Non Urusan |
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan sektoral | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 33,000,000 | 70,000,000 | 56,000,000 | 78,500,000 | 88,000,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) Dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) | meningkatkan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)SKPD | meningkatkan akuntabilitas penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan Pembuatan Profil dinas | meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMD dalam bentuk akurasi data dan profil dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | Non Urusan |

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Target (%) | | | | | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | Urusan |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | | 1,320,980,636 | 2,791,795,000 | 2,907,150,000 | 3,431,800,000 | 3,900,000,000 | |
| 1 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Orientasi pengurus LPMD/K | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,853,000 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 2) | Fasilitasi Penguatan TP.PKK | Jumlah TP.PKK tingkat desa/kelurahan yang aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 571,734,000 | 722,660,000 | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | Urusan Wajib |
| 3) | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 118,010,036 | 490,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 | Urusan Wajib |
| 4) | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 242,693,900 | 240,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Jumlah desa yang KPM nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,085,000 | 390,000,000 | 195,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pelatihan P3MD | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110,420,700 | 230,000,000 | 300,000,000 | 390,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |
| 7) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT/RW | Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115,184,000 | 329,135,000 | 350,000,000 | 490,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 8) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K | Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 380,350,000 | 395,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Target (%) | | | | | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | Urusan |
|----------|--|--|------------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | JUMLAH TOTAL | | | | | | | 1,550,401,622 | 3,151,654,000 | 3,490,951,060 | 4,920,916,100 | 5,832,916,100 | |
| | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Meningkatkan perekonomian masyarakat yang luas melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat lainnya | | | | | | 910,191,100 | 1,611,654,000 | 2,317,916,100 | 3,165,916,100 | 3,797,916,100 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (BUMDES) | Jumlah BUMDes yang aktif | 26 | 34 | 30 | 30 | 30 | 73,615,000 | 390,000,000 | 750,000,000 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,866,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 3) | Administrasi Proyek PNPB Mandiri Perdesaan, untuk 22 UPK, 22-BP-UPK, 22 BKAD | Meningkatnya jumlah aset SPP PNPB-MPD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,109,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 4) | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, bentuk Partisipasi TK. Propinsi dan Nasional | Jumlah desa yang menerapkan TTG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,000,000 | 240,800,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal | Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,600,000 | 180,000,000 | 200,000,000 | 298,000,000 | 420,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan keterampilan masyarakat | Jumlah desa yang kelompok usaha ekonomi produktifnya dilatih | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 450,854,000 | 497,916,100 | 497,916,100 | 497,916,100 | Urusan Wajib |
| 7) | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | Jumlah desa yang memiliki posyantek | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | Urusan Wajib |
| 8) | Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPB-MPD | Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP eks PNPB-MPD | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 350,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa | | | | | | 640,210,522 | 1,540,000,000 | 1,173,034,960 | 1,755,000,000 | 2,035,000,000 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa | Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260,000,000 | 134,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,894,800 | 230,000,000 | 112,182,400 | 350,000,000 | 400,000,000 | Urusan Wajib |
| 3) | Fasilitasi TMMD dan BSMSS | Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 203,368,272 | 450,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | Urusan Wajib |
| 4) | Penyelenggaraan Perlombaan Desa | Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 227,081,250 | 450,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 148,866,200 | 150,000,000 | 165,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kel yang dibina | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 116,852,560 | 130,000,000 | 145,000,000 | Urusan Wajib |
| 7) | Fasilitasi Penataan Batas Desa | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 165,000,000 | Urusan Wajib |

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Target (%) | | | | | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | Urusan |
|---------------------|---|---|------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | 2,052,008,000 | 2,568,538,000 | 2,884,448,000 | 2,467,576,000 | 2,955,576,000 | |
| 1 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | | | | | | 2,052,008,000 | 2,568,538,000 | 2,884,448,000 | 2,467,576,000 | 2,955,576,000 | |
| <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 153,832,000 | 350,000,000 | 275,000,000 | 500,000,000 | 650,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 828,000,000 | Urusan Wajib |
| 3) | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitas pemilihan kuwu | Jumlah desa yang dimonev | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 116,980,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 4) | Penyusunan profil desa/kel. | Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 189,000,000 | 207,900,000 | 249,890,000 | 250,000,000 | 265,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175,720,000 | 500,000,000 | 356,982,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa | Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 26,000,000 | 142,393,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 7) | Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu | Jumlah desa yang ikut pembekalan | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 385,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 8) | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah desa yang dimonev | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107,900,000 | 385,169,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 330,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9) | Fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | Urusan Wajib |
| 10) | Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih | Jumlah kuwu yang disahkan dan dilantik | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 11) | Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa | Jumlah Raperbup yang dievaluasi | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 55,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | Urusan Wajib |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | | | | | | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan | Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dim penyelenggaraan administrasi desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | Urusan Wajib |

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

| No | Kebijakan Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Target (%) | | | | | Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) | | | | | Urusan |
|---------------------|---|---|------------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | 6,204,482,258 | 9,758,758,000 | 10,242,269,060 | 11,853,792,100 | 14,057,852,100 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 620,565,000 | 623,910,000 | 571,220,000 | 587,000,000 | 625,860,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 187,690,000 | 187,690,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,200,000 | 7,600,000 | 7,900,000 | 8,000,000 | 8,360,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22,500,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27,000,000 | 29,500,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | 35,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,250,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | Non Urusan |
| 6) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 259,685,000 | 250,000,000 | 200,000,000 | 210,000,000 | 230,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18,120,000 | 18,480,000 | 18,700,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | Non Urusan |
| 8) | Penyediaan Makanan dan Minuman | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,140,000 | 30,140,000 | 30,140,000 | 31,000,000 | 35,000,000 | Non Urusan |
| 9) | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,980,000 | 73,000,000 | 66,980,000 | 67,000,000 | 75,000,000 | Non Urusan |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 535,271,000 | 431,614,000 | 245,000,000 | 273,000,000 | 551,500,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pembangunan Gedung Kantor | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 3) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109,357,000 | 125,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 | 145,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102,564,000 | 102,564,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 127,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 6) | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Meningkatkan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,800,000 | 14,050,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 18,500,000 | Non Urusan |
| 7) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 37,150,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | Non Urusan |
| 3 | Program Peningkatan disiplin Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 28,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Meningkatkan kedisiplinan dan kepuasan pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23,000,000 | 9,735,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bid.Kepegawaian dan pemerintahan | meningkatkan kinerja pegawai DPMD dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | Non Urusan |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 64,256,000 | 71,512,000 | 77,000,000 | 84,000,000 | 92,000,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | meningkatkan kinerja pegawai DPMD yang terukur dalam tertib administrasi penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP sebagai wujud pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 (satu) tahun. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2) | Penyusunan laporan keuangan semesteran | meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan semesteran selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,756,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan akhir tahun selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,000,000 | 7,756,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | Non Urusan |
| 4) | Penyusunan pelaporan capaian Program dan kegiatan Triwulanan | meningkatkan akuntabilitas laporan capaian program dan kegiatan triwulan selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | Non Urusan |
| 5) | Penyusunan Laporan tahunan dinas | meningkatkan akuntabilitas laporan tahunan dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | Non Urusan |
| 6) | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan dinas | meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 19,000,000 | Non Urusan |
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan sektoral | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | 33,000,000 | 70,000,000 | 56,000,000 | 78,500,000 | 88,000,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral- RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) Dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) | meningkatkan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | Non Urusan |
| 2) | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)SKPD | meningkatkan akuntabilitas penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | Non Urusan |
| 3) | Penyusunan Pembuatan Profil dinas | meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMD dalam bentuk akurasi data dan profil dinas selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | Non Urusan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7 | Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan | | | | | | 1,320,980,636 | 2,791,795,000 | 2,907,150,000 | 3,431,800,000 | 3,900,000,000 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Orientasi pengurus LPMD/K | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,853,000 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 2) | Fasilitasi Penguatan TP.PKK | Jumlah TP.PKK tingkat desa/kelurahan yang aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 571,734,000 | 722,660,000 | 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | Urusan Wajib |
| 3) | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 118,010,036 | 490,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 | Urusan Wajib |
| 4) | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 242,693,900 | 240,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Jumlah desa yang KPM nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,085,000 | 390,000,000 | 195,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pelatihan P3MD | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110,420,700 | 230,000,000 | 300,000,000 | 390,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |
| 7) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT/RW | Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115,184,000 | 329,135,000 | 350,000,000 | 490,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 8) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K | Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 380,350,000 | 395,000,000 | 450,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 8 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Meningkatkan perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bundes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat | | | | | | 910,191,100 | 1,611,654,000 | 2,317,916,100 | 3,165,916,100 | 3,797,916,100 | |
| | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (BUMDES) | Jumlah BUMDes yang aktif | 26 | 34 | 30 | 30 | 30 | 73,615,000 | 390,000,000 | 750,000,000 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,866,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 3) | Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan, untuk 22 UPK, 22-BP-UPK, 22 BKAD | Meningkatnya jumlah aset SPP PNPM-MPD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,109,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 4) | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, bentuk Partisipasi Tk. Propinsi dan Nasional | Jumlah desa yang menerapkan TTG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,000,000 | 240,800,000 | 350,000,000 | 400,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan usaha sektor informal | Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,600,000 | 180,000,000 | 200,000,000 | 298,000,000 | 420,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pemberdayaan usaha ekonomi produktif dan keterampilan masyarakat | Jumlah desa yang kelompok usaha ekonomi produktifnya dilatih | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 450,854,000 | 497,916,100 | 497,916,100 | 497,916,100 | Urusan Wajib |
| 7) | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | Jumlah desa yang memiliki posyantek | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | Urusan Wajib |
| 8) | Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM-MPD | Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP eks PNPM-MPD | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 350,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 | 750,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa | | | | | | 640,210,522 | 1,540,000,000 | 1,173,034,960 | 1,755,000,000 | 2,035,000,000 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa | Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 260,000,000 | 134,000,000 | 150,000,000 | 175,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa | Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,894,800 | 230,000,000 | 112,182,400 | 350,000,000 | 400,000,000 | Urusan Wajib |
| 3) | Fasilitasi TMMD dan BSMSS | Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 203,368,272 | 450,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | Urusan Wajib |
| 4) | Penyelenggaraan Perlombaan Desa | Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 227,081,250 | 450,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 148,866,200 | 150,000,000 | 165,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kel yang dibina | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 116,852,560 | 130,000,000 | 145,000,000 | Urusan Wajib |
| 7) | Fasilitasi Penataan Batas Desa | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 165,000,000 | Urusan Wajib |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatkan kapeasit aparat pemerintah desa yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | | | | | | 1,894,432,000 | 2,410,962,000 | 2,726,872,000 | 2,310,000,000 | 2,798,000,000 | |
| | <i>Kegiatan :</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 153,832,000 | 350,000,000 | 275,000,000 | 500,000,000 | 650,000,000 | Urusan Wajib |
| 2) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 828,000,000 | Urusan Wajib |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3) | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu | Jumlah desa yang dimonev | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 116,980,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 4) | Penyusunan profil desa/kel. | Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 189,000,000 | 207,900,000 | 249,890,000 | 250,000,000 | 265,000,000 | Urusan Wajib |
| 5) | Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175,720,000 | 500,000,000 | 356,982,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | Urusan Wajib |
| 6) | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan peraturan di desa | Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 26,000,000 | 142,393,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 7) | Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu | Jumlah desa yang ikut pembekalan | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 385,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 8) | Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah desa yang dimonev | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107,900,000 | 385,169,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 330,000,000 | Urusan Wajib |
| 9) | Fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 | Urusan Wajib |
| 10) | Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih | Jumlah kuwu yang disahkan dan dilantik | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | Urusan Wajib |
| 11) | Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa | Jumlah Raperbup yang dievaluasi | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 55,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | Urusan Wajib |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | Meningkatkan kapaetas aparatur pemerintah kecamatan yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | | | | | | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | |
| Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan | Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | Urusan Wajib |

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA SKPD LINGKUP KABUPATEN
DINAS PEMERAYAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

| No | Saasran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Capaian Pada Tahun Areal Pelaksanaan | | | Tahun 1 | | | Tahun 2 | | | Tahun 3 | | | Tahun 4 | | | Tahun 5 | | | Tahun 6 | | | Tahun 7 | | | Tahun 8 | | | Tahun 9 | | | Tahun 10 | | | Tahun 11 | | | Tahun 12 | | | Tahun 13 | | | Tahun 14 | | | Tahun 15 | | | Tahun 16 | | | Tahun 17 | | | Tahun 18 | | | Tahun 19 | | | Tahun 20 | | | Tahun 21 | | | Tahun 22 | | | Tahun 23 | | | Tahun 24 | | | Tahun 25 | | | Tahun 26 | | | Tahun 27 | | | Tahun 28 | | | Tahun 29 | | | Tahun 30 | | | Tahun 31 | | | Tahun 32 | | | Tahun 33 | | | Tahun 34 | | | Tahun 35 | | | Tahun 36 | | | Tahun 37 | | | Tahun 38 | | | Tahun 39 | | | Tahun 40 | | | Tahun 41 | | | Tahun 42 | | | Tahun 43 | | | Tahun 44 | | | Tahun 45 | | | Tahun 46 | | | Tahun 47 | | | Tahun 48 | | | Tahun 49 | | | Tahun 50 | | | Tahun 51 | | | Tahun 52 | | | Tahun 53 | | | Tahun 54 | | | Tahun 55 | | | Tahun 56 | | | Tahun 57 | | | Tahun 58 | | | Tahun 59 | | | Tahun 60 | | | Tahun 61 | | | Tahun 62 | | | Tahun 63 | | | Tahun 64 | | | Tahun 65 | | | Tahun 66 | | | Tahun 67 | | | Tahun 68 | | | Tahun 69 | | | Tahun 70 | | | Tahun 71 | | | Tahun 72 | | | Tahun 73 | | | Tahun 74 | | | Tahun 75 | | | Tahun 76 | | | Tahun 77 | | | Tahun 78 | | | Tahun 79 | | | Tahun 80 | | | Tahun 81 | | | Tahun 82 | | | Tahun 83 | | | Tahun 84 | | | Tahun 85 | | | Tahun 86 | | | Tahun 87 | | | Tahun 88 | | | Tahun 89 | | | Tahun 90 | | | Tahun 91 | | | Tahun 92 | | | Tahun 93 | | | Tahun 94 | | | Tahun 95 | | | Tahun 96 | | | Tahun 97 | | | Tahun 98 | | | Tahun 99 | | | Tahun 100 | | | Tahun 101 | | | Tahun 102 | | | Tahun 103 | | | Tahun 104 | | | Tahun 105 | | | Tahun 106 | | | Tahun 107 | | | Tahun 108 | | | Tahun 109 | | | Tahun 110 | | | Tahun 111 | | | Tahun 112 | | | Tahun 113 | | | Tahun 114 | | | Tahun 115 | | | Tahun 116 | | | Tahun 117 | | | Tahun 118 | | | Tahun 119 | | | Tahun 120 | | | Tahun 121 | | | Tahun 122 | | | Tahun 123 | | | Tahun 124 | | | Tahun 125 | | | Tahun 126 | | | Tahun 127 | | | Tahun 128 | | | Tahun 129 | | | Tahun 130 | | | Tahun 131 | | | Tahun 132 | | | Tahun 133 | | | Tahun 134 | | | Tahun 135 | | | Tahun 136 | | | Tahun 137 | | | Tahun 138 | | | Tahun 139 | | | Tahun 140 | | | Tahun 141 | | | Tahun 142 | | | Tahun 143 | | | Tahun 144 | | | Tahun 145 | | | Tahun 146 | | | Tahun 147 | | | Tahun 148 | | | Tahun 149 | | | Tahun 150 | | | Tahun 151 | | | Tahun 152 | | | Tahun 153 | | | Tahun 154 | | | Tahun 155 | | | Tahun 156 | | | Tahun 157 | | | Tahun 158 | | | Tahun 159 | | | Tahun 160 | | | Tahun 161 | | | Tahun 162 | | | Tahun 163 | | | Tahun 164 | | | Tahun 165 | | | Tahun 166 | | | Tahun 167 | | | Tahun 168 | | | Tahun 169 | | | Tahun 170 | | | Tahun 171 | | | Tahun 172 | | | Tahun 173 | | | Tahun 174 | | | Tahun 175 | | | Tahun 176 | | | Tahun 177 | | | Tahun 178 | | | Tahun 179 | | | Tahun 180 | | | Tahun 181 | | | Tahun 182 | | | Tahun 183 | | | Tahun 184 | | | Tahun 185 | | | Tahun 186 | | | Tahun 187 | | | Tahun 188 | | | Tahun 189 | | | Tahun 190 | | | Tahun 191 | | | Tahun 192 | | | Tahun 193 | | | Tahun 194 | | | Tahun 195 | | | Tahun 196 | | | Tahun 197 | | | Tahun 198 | | | Tahun 199 | | | Tahun 200 | | | Tahun 201 | | | Tahun 202 | | | Tahun 203 | | | Tahun 204 | | | Tahun 205 | | | Tahun 206 | | | Tahun 207 | | | Tahun 208 | | | Tahun 209 | | | Tahun 210 | | | Tahun 211 | | | Tahun 212 | | | Tahun 213 | | | Tahun 214 | | | Tahun 215 | | | Tahun 216 | | | Tahun 217 | | | Tahun 218 | | | Tahun 219 | | | Tahun 220 | | | Tahun 221 | | | Tahun 222 | | | Tahun 223 | | | Tahun 224 | | | Tahun 225 | | | Tahun 226 | | | Tahun 227 | | | Tahun 228 | | | Tahun 229 | | | Tahun 230 | | | Tahun 231 | | | Tahun 232 | | | Tahun 233 | | | Tahun 234 | | | Tahun 235 | | | Tahun 236 | | | Tahun 237 | | | Tahun 238 | | | Tahun 239 | | | Tahun 240 | | | Tahun 241 | | | Tahun 242 | | | Tahun 243 | | | Tahun 244 | | | Tahun 245 | | | Tahun 246 | | | Tahun 247 | | | Tahun 248 | | | Tahun 249 | | | Tahun 250 | | | Tahun 251 | | | Tahun 252 | | | Tahun 253 | | | Tahun 254 | | | Tahun 255 | | | Tahun 256 | | | Tahun 257 | | | Tahun 258 | | | Tahun 259 | | | Tahun 260 | | | Tahun 261 | | | Tahun 262 | | | Tahun 263 | | | Tahun 264 | | | Tahun 265 | | | Tahun 266 | | | Tahun 267 | | | Tahun 268 | | | Tahun 269 | | | Tahun 270 | | | Tahun 271 | | | Tahun 272 | | | Tahun 273 | | | Tahun 274 | | | Tahun 275 | | | Tahun 276 | | | Tahun 277 | | | Tahun 278 | | | Tahun 279 | | | Tahun 280 | | | Tahun 281 | | | Tahun 282 | | | Tahun 283 | | | Tahun 284 | | | Tahun 285 | | | Tahun 286 | | | Tahun 287 | | | Tahun 288 | | | Tahun 289 | | | Tahun 290 | | | Tahun 291 | | | Tahun 292 | | | Tahun 293 | | | Tahun 294 | | | Tahun 295 | | | Tahun 296 | | | Tahun 297 | | | Tahun 298 | | | Tahun 299 | | | Tahun 300 | | | Tahun 301 | | | Tahun 302 | | | Tahun 303 | | | Tahun 304 | | | Tahun 305 | | | Tahun 306 | | | Tahun 307 | | | Tahun 308 | | | Tahun 309 | | | Tahun 310 | | | Tahun 311 | | | Tahun 312 | | | Tahun 313 | | | Tahun 314 | | | Tahun 315 | | | Tahun 316 | | | Tahun 317 | | | Tahun 318 | | | Tahun 319 | | | Tahun 320 | | | Tahun 321 | | | Tahun 322 | | | Tahun 323 | | | Tahun 324 | | | Tahun 325 | | | Tahun 326 | | | Tahun 327 | | | Tahun 328 | | | Tahun 329 | | | Tahun 330 | | | Tahun 331 | | | Tahun 332 | | | Tahun 333 | | | Tahun 334 | | | Tahun 335 | | | Tahun 336 | | | Tahun 337 | | | Tahun 338 | | | Tahun 339 | | | Tahun 340 | | | Tahun 341 | | | Tahun 342 | | | Tahun 343 | | | Tahun 344 | | | Tahun 345 | | | Tahun 346 | | | Tahun 347 | | | Tahun 348 | | | Tahun 349 | | | Tahun 350 | | | Tahun 351 | | | Tahun 352 | | | Tahun 353 | | | Tahun 354 | | | Tahun 355 | | | Tahun 356 | | | Tahun 357 | | | Tahun 358 | | | Tahun 359 | | | Tahun 360 | | | Tahun 361 | | | Tahun 362 | | | Tahun 363 | | | Tahun 364 | | | Tahun 365 | | | Tahun 366 | | | Tahun 367 | | | Tahun 368 | | | Tahun 369 | | | Tahun 370 | | | Tahun 371 | | | Tahun 372 | | | Tahun 373 | | | Tahun 374 | | | Tahun 375 | | | Tahun 376 | | | Tahun 377 | | | Tahun 378 | | | Tahun 379 | | | Tahun 380 | | | Tahun 381 | | | Tahun 382 | | | Tahun 383 | | | Tahun 384 | | | Tahun 385 | | | Tahun 386 | | | Tahun 387 | | | Tahun 388 | | | Tahun 389 | | | Tahun 390 | | | Tahun 391 | | | Tahun 392 | | | Tahun 393 | | | Tahun 394 | | | Tahun 395 | | | Tahun 396 | | | Tahun 397 | | | Tahun 398 | | | Tahun 399 | | | Tahun 400 | | | Tahun 401 | | | Tahun 402 | | | Tahun 403 | | | Tahun 404 | | | Tahun 405 | | | Tahun 406 | | | Tahun 407 | | | Tahun 408 | | | Tahun 409 | | | Tahun 410 | | | Tahun 411 | | | Tahun 412 | | | Tahun 413 | | | Tahun 414 | | | Tahun 415 | | | Tahun 416 | | | Tahun 417 | | | Tahun 418 | | | Tahun 419 | | | Tahun 420 | | | Tahun 421 | | | Tahun 422 | | | Tahun 423 | | | Tahun 424 | | | Tahun 425 | | | Tahun 426 | | | Tahun 427 | | | Tahun 428 | | | Tahun 429 | | | Tahun 430 | | | Tahun 431 | | | Tahun 432 | | | Tahun 433 | | | Tahun 434 | | | Tahun 435 | | | Tahun 436 | | | Tahun 437 | | | Tahun 438 | | | Tahun 439 | | | Tahun 440 | | | Tahun 441 | | | Tahun 442 | | | Tahun 443 | | | Tahun 444 | | | Tahun 445 | | | Tahun 446 | | | Tahun 447 | | | Tahun 448 | | | Tahun 449 | | | Tahun 450 | | | Tahun 451 | | | Tahun 452 | | | Tahun 453 | | | Tahun 454 | | | Tahun 455 | | | Tahun 456 | | | Tahun 457 | | | Tahun 458 | | | Tahun 459 | | | Tahun 460 | | | Tahun 461 | | | Tahun 462 | | | Tahun 463 | | | Tahun 464 | | | Tahun 465 | | | Tahun 466 | | | Tahun 467 | | | Tahun 468 | | | Tahun 469 | | | Tahun 470 | | | Tahun 471 | | | Tahun 472 | | | Tahun 473 | | | Tahun 474 | | | Tahun 475 | | | Tahun 476 | | | Tahun 477 | | | Tahun 478 | | | Tahun 479 | | | Tahun 480 | | | Tahun 481 | | | Tahun 482 | | | Tahun 483 | | | Tahun 484 | | | Tahun 485 | | | Tahun 486 | | | Tahun 487 | | | Tahun 488 | | | Tahun 489 | | | Tahun 490 | | | Tahun 491 | | | Tahun 492 | | | Tahun 493 | | | Tahun 494 | | | Tahun 495 | | | Tahun 496 | | | Tahun 497 | | | Tahun 498 | | | Tahun 499 | | | Tahun 500 | | | Tahun 501 | | | Tahun 502 | | | Tahun 503 | | | Tahun 504 | | | Tahun 505 | | | Tahun 506 | | | Tahun 507 | | | Tahun 508 | | | Tahun 509 | | | Tahun 510 | | | Tahun 511 | | | Tahun 512 | | | Tahun 513 | | | Tahun 514 | | | Tahun 515 | | | Tahun 516 | | | Tahun 517 | | | Tahun 518 | | | Tahun 519 | | | Tahun 520 | | | Tahun 521 | | | Tahun 522 | | | Tahun 523 | | | Tahun 524 | | | Tahun 525 | | | Tahun 526 | | | Tahun 527 | | | Tahun 528 | | | Tahun 529 | | | Tahun 530 | | | Tahun 531 | | | Tahun 532 | | | Tahun 533 | | | Tahun 534 | | | Tahun 535 | | | Tahun 536 | | | Tahun 537 | | | Tahun 538 | | | Tahun 539 | | | Tahun 540 | | | Tahun 541 | | | Tahun 542 | | | Tahun 543 | | | Tahun 544 | | | Tahun 545 | | | Tahun 546 | | | Tahun 547 | | | Tahun 548 | | | Tahun 549 | | | Tahun 550 | | | Tahun 551 | | | Tahun 552 | | | Tahun 553 | | | Tahun 554 | | | Tahun 555 | | | Tahun 556 | | | Tahun 557 | | | Tahun 558 | | | Tahun 559 | | | Tahun 560 | | | Tahun 561 | | | Tahun 562 | | | Tahun 563 | | | Tahun 564 | | | Tahun 565 | | | Tahun 566 | | | Tahun 567 | | | Tahun 568 | | | Tahun 569 | | | Tahun 570 | | | Tahun 571 | | | Tahun 572 | | | Tahun 573 | | | Tahun 574 | | | Tahun 575 | | | Tahun 576 | | | Tahun 577 | | | Tahun 578 | | | Tahun 579 | | | Tahun 580 | | | Tahun 581 | | | Tahun 582 | | | Tahun 583 | | | Tahun 584 | | | Tahun 585 | | | Tahun 586 | | | Tahun 587 | | | Tahun 588 | | | Tahun 589 | | | Tahun 590 | | | Tahun 591 | | | Tahun 592 | | | Tahun 593 | | | Tahun 594 | | | Tahun 595 | | | Tahun 596 | | | Tahun 597 | | | Tahun 598 | | | Tahun 599 | | | Tahun 600 | | | Tahun 601 | | | Tahun 602 | | | Tahun 603 | | | Tahun 604 | | | Tahun 605 | | | Tahun 606 | | | Tahun 607 | | | Tahun 608 | | | Tahun 609 | | | Tahun 610 | | | Tahun 611 | | | Tahun 612 | | | Tahun 613 | | | Tahun 614 | | | Tahun 615 | | | Tahun 616 | | | Tahun 617 | | | Tahun 618 | | | Tahun 619 | | | Tahun 620 | | | Tahun 621 | | | Tahun 622 | | | Tahun 623 | | | Tahun 624 | | | Tahun 625 | | | Tahun 626 | | | Tahun 627 | | | Tahun 628 | | | Tahun 629 | | | Tahun 630 | | | Tahun 631 | | | Tahun 632 | | | Tahun 633 | | | Tahun 634 | | | Tahun 635 | | | Tahun 636 | | | Tahun 637 | | | Tahun 638 | | | Tahun 639 | | | Tahun 640 | | | Tahun 641 | | | Tahun 642 | | | Tahun 643 | | | Tahun 644 | | | Tahun 645 | | | Tahun 646 | | | Tahun 647 | | | Tahun 648 | | | Tahun 649 | | | Tahun 650 | | | Tahun 651 | | | Tahun 652 | | | Tahun 653 | | | Tahun 654 | | | Tahun 655 | | | Tahun 656 | | | Tahun 657 | | | Tahun 658 | | | Tahun 659 | | | Tahun 660 | | | Tahun 661 | | | Tahun 662 | | | Tahun 663 | | | Tahun 664 | | | Tahun 665 | | | Tahun 666 | | | Tahun 667 | | | Tahun 668 | | | Tahun 669 | | | Tahun 670 | | | Tahun 671 | | | Tahun 672 | | | Tahun 673 | | | Tahun 674 | | | Tahun 675 | | | Tahun 676 | | | Tahun 677 | | | Tahun 678 | | | Tahun 679 | | | Tahun 680 | | | Tahun 681 | | | Tahun 682 | | | Tahun 683 | | | Tahun 684 | | | Tahun 685 | | | Tahun 686 | | | Tahun 687 | | | Tahun 688 | | | Tahun 689 | | | Tahun 690 | | | Tahun 691 | | | Tahun 692 | | | Tahun 693 | | | Tahun 694 | | | Tahun 695 | | | Tahun 696 | | | Tahun 697 | | | Tahun 698 | | | Tahun 699 | | | Tahun 700 | | | Tahun 701 | | | Tahun 702 | | | Tahun 703 | | | Tahun 704 | | | Tahun 705 | | | Tahun 706 | | | Tahun 707 | | | Tahun 708 | | | Tahun 709 | | | Tahun 710 | | | Tahun 711 | | | Tahun 712 | | | Tahun 713 | | | Tahun 714 | | | Tahun 715 | | | Tahun 716 | | | Tahun 717 | | | Tahun 718 | | | Tahun 719 | | | Tahun 720 | | | Tahun 721 | | | Tahun 722 | | | Tahun 723 | | | Tahun 724 | | | Tahun 725 | | | Tahun 726 | | | Tahun 727 | | | Tahun 728 | | | Tahun 729 | | | Tahun 730 | | | Tahun 731 | | | Tahun 732 | | | Tahun 733 | | | Tahun 734 | | | Tahun 735 | | | Tahun 736 | | | Tahun 737 | | | Tahun 738 | | | Tahun 739 | | | Tahun 740 | | | Tahun 741 | | | Tahun 742 | | | Tahun 743 | | | Tahun 744 | | | Tahun 745 | | | Tahun 746 | | | Tahun 747 | | | Tahun 748 | | | Tahun 749 | | | Tahun 750 | | | Tahun 751 | | | Tahun 752 | | | Tahun 753 | | | Tahun 754 | | | Tahun 755 | | | Tahun 756 | | | Tahun 757 | | | Tahun 758 | | | Tahun 759 | | | Tahun 760 | | | Tahun 761 | | | Tahun 762 | | | Tahun 763 | | | Tahun 764 | | | Tahun 765 | | | Tahun 766 | | | Tahun 767 | | | Tahun 768 | | | Tahun 769 | | | Tahun 770 | | | Tahun 771 | | | Tahun 772 | | | Tahun 773 | | | Tahun 774 | | | Tahun 775 | | | Tahun 776 | | | Tahun 777 | | | Tahun 778 | | | Tahun 779 | | | Tahun 780 | | | Tahun 781 | | | Tahun 782 | | | Tahun 783 | | | Tahun 784 | | | Tahun 785 | | | Tahun 786 | | | Tahun 787 | | | Tahun 788 | | | Tahun 789 | | | Tahun 790 | | | Tahun 791 | | | Tahun 792 | | | Tahun 793 | | | Tahun 794 | | | Tahun 795 | | | Tahun 796 | | | Tahun 797 | | | Tahun 798 | | | Tahun 799 | | | Tahun 800 | | | Tahun 801 | | | Tahun 802 | | | Tahun 803 | | | Tahun 804 | | | Tahun 805 | | | Tahun 806 | | | Tahun 807 | | | Tahun 808 | | | Tahun 809 | | | Tahun 810 | | | Tahun 811 | | | Tahun 812 | | | Tahun 813 | | | Tahun 814 | | | Tahun 815 | | | Tahun 816 | | | Tahun 817 | | | Tahun 818 | | | Tahun 819 | | | Tahun 820 | | | Tahun 821 | | | Tahun 822 | | | Tahun 823 | | | Tahun 824 | | | Tahun 825 | | | Tahun 826 | | | Tahun 827 | | | Tahun 828 | | | Tahun 829 | | | Tahun 830 | | | Tahun 831 | | | Tahun 832 | | | Tahun 833 | | | Tahun 834 | | | Tahun 835 | | | Tahun 836 | | | Tahun 837 | | | Tahun 838 | | | Tahun 839 | | | Tahun 840 | | | Tahun 841 | | | Tahun 842 | | | Tahun 843 | | | Tahun 844 | | | Tahun 845 | | | Tahun 846 | | | Tahun 847 | | | Tahun 848 | | | Tahun 849 | | | Tahun 850 | | | Tahun 851 | | | Tahun 852 | | | Tahun 853 | | | Tahun 854 | | | Tahun 855 | | | Tahun 856 | | | Tahun 857 | | | Tahun 858 | | | Tahun 859 | | | Tahun 860 | | | Tahun 861 | | | Tahun 862 | | | Tahun 863 | | | Tahun 864 | | | Tahun 865 | | | Tahun 866 | | | Tahun 867 | | | Tahun 868 | | | Tahun 869 | | | Tahun 870 | | | Tahun 871 | | | Tahun 872 | | | Tahun 873 | | | Tahun 874 | | | Tahun 875 | | | Tahun 876 | | | Tahun 877 | | | Tahun 878 | | | Tahun 879 | | | Tahun 880 | | | Tahun 881 | | | Tahun 882 | | | Tahun 883 | | | Tahun 884 | | | Tahun 885 | | | Tahun 886 | | | Tahun 887 | | | | | |
|----|---------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
|----|---------|----------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|-------|---|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembelian Bahan Baku dan Pasokan Penyediaan Uraian | Tipe A | : Jumlah dana | 3 | Media | 3 | 18,320,000 | 18,320,000 | 18,400,000 | 18,400,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|--|--------|---------------|---|-------|---|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|--|----------|--------------|
| | Pengesahan dan pelantikan kuuw terpilih | Input | 1. Jumlah dana | 0 | 75,000,000 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250,000,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output | 1. Terselenggaranya pengesahan dan pelantikan kuuw terpilih | 0 | Kuuw | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 0 | 242 | Kuuw | |
| | | Outcome | 1. Jumlah kuuw yang dilantik | 0 | Kuuw | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 100 | 0 | 242 | Kuuw | |
| | Evaluasi Perbup tentang pemerkabid desa | Input | 1. Jumlah dana | 0 | 0 | 55,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 0 | 55,500,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 280,500,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | Output | 1. Terselenggaranya pelaksanaan Perbup Bup pemerintah desa | 0 | Raperbup | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 12 | Raperbup | |
| | | Outcome | 1. Jumlah Raperbup yang dievaluasi | 0 | Raperbup | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 12 | Raperbup | |
| 11 | Misi ke 6 : Meningkatkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KBKN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah des., yg bersih ber wibawa, terpacaran dan disiplin | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | | | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 151,632,400 | 72,113,400 | | | 96 | 46 | 787,880,000 | | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan | Input | 1. Jumlah dana | 0 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 151,632,400 | 72,113,400 | | | 96 | 46 | 787,880,000 | DPMD | Kab. Cirebon |
| | | | Output | 1. Mengelutnya kapereka lal pemerintah kecamatan dan pendamping desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa | 0 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | | |
| | | | Outcome | 1. Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membantu aparat desa dan penyelenggaraan administrasi desa | 0 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | Aparatur Kecamatan dan pendamping desa | | |

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian (%) Tahun Ke | | | | |
|-----|---|------------|---|--------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|------|----------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 100 | 60 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| | | 100% | tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 106 | 106 | | | | 42 | 42 | | | |
| | | 100% | terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | | | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | terlaksananya pembangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya kendaraan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| 4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepegawain dan administrasi pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 100 | | | |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 100% | tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100 | 100 | | | |
| 7 | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan | 100% | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | | 160 | 252 | 0 | 0 | 0 | 160 | 252 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK | | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama | | 461 | 538 | 615 | 692 | 769 | 729 | 738 | | | | 158 | 137 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM | | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang KPM nya dilatih | | 42 | 252 | 50 | 34 | 34 | 42 | 252 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih | | 69 | 160 | 61 | 61 | 61 | 69 | 160 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih | | 102 | 74 | 120 | 58 | 58 | 102 | 74 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih | | 0 | 0 | 190 | 117 | 117 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 8 | Meningkatnya perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bumdes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat | 100% | Jumlah BUMDes yang aktif | | 50 | 175 | 96 | 45 | 46 | 13 | 175 | | | | 26 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP PNPM-MPD | | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | | | | 109 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang menerapkan TTG | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | 0 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina | | 40 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 18 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang kelompok usaha ekonomi produktifnya dilatih | | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | | | | 0 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang memiliki posyantek | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah aset SPP dan UEP eks PNPM-MPD | | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 0 | 75 | | | | 0 | 167 | | | |
| 9 | Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa | 100% | Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina | | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | | | | 0 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes | | 68 | 412 | 412 | 412 | 412 | 68 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang difasilitasi | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa/kel yang dibina | | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang difasilitasi | | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 10 | Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes yg bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | 100% | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang dimonev | | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel | | 80 | 80 | 40 | 112 | 112 | 80 | 80 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih | | 80 | 120 | 30 | 88 | 94 | 80 | 120 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes | | 115 | 145 | 152 | 0 | 0 | 115 | 145 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang ikut pembekalan | | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang dimonev | | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah desa yang difasilitasi | | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 | 412 | | | | 0 | 100 | | | |
| | | 100% | Jumlah kuwu yang dilantik | | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | | | | 100 | 0 | | | |
| | | 100% | Jumlah Raperbup yang dievaluasi | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | 0 | 100 | | | |
| 11 | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kec. Dan pendamping desa yg bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel | 100% | Jumlah aparatur kecamatan yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | 100 | 100 | | | |

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

| No. | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----|--|-------------------------|---------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | BELANJA DAERAH | 8,812,014,121 | 9,985,624,400 | | | | 8,580,700,830 | 8,981,187,189 | | | | 97 | 90 | | | | 13 | (8) |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,606,946,000 | 2,899,662,000 | | | | 2,634,791,293 | 2,634,791,293 | | | | 101 | 91 | | | | 11 | (10) |
| | BELANJA LANGSUNG | 6,205,068,121 | 7,085,962,400 | | | | 5,945,909,537 | 6,346,395,896 | | | | 96 | 90 | | | | 14 | (7) |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 620,564,943 | 443,198,100 | | | | 545,057,787 | 349,632,226 | | | | 88 | 79 | | | | (29) | (10) |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 187,690,400 | 165,600,000 | | | | 128,586,787 | 89,458,526 | | | | 69 | 54 | | | | (12) | (21) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 7,200,000 | 7,599,000 | | | | 4,556,000 | 6,942,100 | | | | 63 | 91 | | | | 6 | 44 |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 22,500,000 | 20,795,600 | | | | 22,500,000 | 20,795,600 | | | | 100 | 100 | | | | (8) | 0 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27,000,000 | 29,150,000 | | | | 27,000,000 | 29,150,000 | | | | 100 | 100 | | | | 8 | 0 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1,250,000 | 2,500,000 | | | | 1,250,000 | 2,500,000 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 0 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 259,684,543 | 90,000,000 | | | | 246,975,000 | 86,000,000 | | | | 95 | 96 | | | | (65) | 0 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 18,120,000 | 14,910,000 | | | | 17,120,000 | 14,910,000 | | | | 94 | 100 | | | | (18) | 6 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 30,140,000 | 27,063,500 | | | | 30,140,000 | 27,063,500 | | | | 100 | 100 | | | | (10) | 0 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 66,980,000 | 85,580,000 | | | | 66,930,000 | 72,812,500 | | | | 100 | 85 | | | | 28 | (15) |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 535,271,304 | 235,276,500 | | | | 512,907,000 | 227,646,500 | | | | 96 | 97 | | | | (56) | 1 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 275,400,000 | 0 | | | | 263,990,000 | 0 | | | | 96 | 0 | | | | (100) | (100) |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 109,357,304 | 123,812,500 | | | | 106,822,000 | 123,112,500 | | | | 98 | 99 | | | | 13 | 2 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 102,564,000 | 102,564,000 | | | | 94,248,000 | 95,634,000 | | | | 92 | 93 | | | | 0 | 1 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10,800,000 | 8,900,000 | | | | 10,800,000 | 8,900,000 | | | | 100 | 100 | | | | (18) | 0 |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 37,150,000 | 0 | | | | 37,047,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 28,585,000 | 9,735,000 | | | | 27,885,000 | 9,735,000 | | | | 98 | 100 | | | | (66) | 3 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peralengkapannya | 23,635,000 | 9,735,000 | | | | 22,935,000 | 9,735,000 | | | | 97 | 100 | | | | (59) | 3 |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 4,950,000 | 0 | | | | 4,950,000 | 0 | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0 | 40,000,000 | | | | 0 | 38,700,000 | | | | 0 | 97 | | | | 100 | 100 |
| | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bkd.Kepegawalan/ISO | 0 | 40,000,000 | | | | 0 | 38,700,000 | | | | 0 | 97 | | | | 100 | 100 |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 64,255,500 | 71,511,000 | | | | 64,255,500 | 70,426,600 | | | | 100 | 98 | | | | 11 | (2) |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,500,000 | 15,000,000 | | | | 11,500,000 | 15,000,000 | | | | 100 | 100 | | | | 38 | 0 |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 7,755,500 | 7,755,500 | | | | 7,755,500 | 7,755,500 | | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 5,000,000 | 7,755,500 | | | | 5,000,000 | 7,755,500 | | | | 100 | 100 | | | | 55 | 0 |
| | Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,315,600 | | | | 100 | 95 | | | | 0 | (5) |
| | Penyusunan Laporan Tahunan Badan | 9,000,000 | 10,000,000 | | | | 9,000,000 | 10,000,000 | | | | 100 | 100 | | | | 11 | 0 |
| | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,600,000 | | | | 100 | 98 | | | | 0 | (3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|-----|-----|--|--|-------|-------|
| 6 | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | 33,000,000 | 65,000,000 | | | 32,167,600 | 65,000,000 | | | 97 | 100 | | | 97 | 3 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | 12,000,000 | 40,000,000 | | | 11,168,000 | 40,000,000 | | | 93 | 100 | | | 233 | 7 |
| | Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD | 11,000,000 | 15,000,000 | | | 10,999,600 | 15,000,000 | | | 100 | 100 | | | 36 | 0 |
| | Penyusunan Pembuatan Profil Badan | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 100 | 100 | | | 0 | 0 |
| 7 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1,320,981,408 | 2,303,145,200 | | | 1,308,469,700 | 2,291,030,200 | | | 99 | 99 | | | 74 | 0 |
| | Orientasi Pengurus LPMD/K | 104,852,800 | 380,350,000 | | | 104,852,800 | 378,500,000 | | | 100 | 100 | | | 263 | (0) |
| | Fasilitasi Penguatan TP. PKK | 571,734,972 | 572,660,000 | | | 565,318,500 | 568,630,000 | | | 99 | 99 | | | 0 | 0 |
| | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu | 118,010,036 | 476,000,000 | | | 115,371,800 | 474,770,000 | | | 98 | 100 | | | 303 | 2 |
| | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 242,693,900 | 200,000,000 | | | 241,276,900 | 196,220,000 | | | 99 | 98 | | | (18) | (1) |
| | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 58,085,000 | 380,000,000 | | | 56,045,000 | 379,370,000 | | | 96 | 100 | | | 554 | 3 |
| | Pelatihan P3MD | 110,420,700 | 130,000,000 | | | 110,420,700 | 129,685,000 | | | 100 | 100 | | | 18 | (0) |
| | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW | 115,184,000 | 164,135,200 | | | 115,184,000 | 163,855,200 | | | 100 | 100 | | | 42 | (0) |
| 8 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 910,191,100 | 1,233,025,200 | | | 877,070,100 | 778,409,200 | | | 96 | 63 | | | 35 | (34) |
| | Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa | 73,615,000 | 406,625,000 | | | 61,195,000 | 383,380,000 | | | 83 | 94 | | | 452 | 13 |
| | Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan | 251,866,850 | 0 | | | 251,491,850 | 0 | | | 100 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Pembinaan Administrasi Proyek PNPB Mandiri Pedesaan | 340,109,250 | 0 | | | 334,679,250 | 0 | | | 98 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional | 100,000,000 | 244,010,000 | | | 98,212,000 | 216,980,000 | | | 98 | 89 | | | 144 | (9) |
| | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal | 74,600,000 | 178,650,600 | | | 61,492,000 | 178,049,200 | | | 82 | 100 | | | 139 | 21 |
| | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | 70,000,000 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | 0 | | | 100 | 0 | | | 0 | (100) |
| | Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPB-MPd | 0 | 333,739,600 | | | 0 | 333,042,600 | | | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| 9 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 640,210,522 | 1,534,216,000 | | | 570,022,050 | 1,425,689,770 | | | 89 | 93 | | | 140 | 4 |
| | Pembinaan Kelompok Masyarakat | 0 | 269,484,000 | | | 0 | 254,460,000 | | | 0 | 94 | | | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 60,894,800 | 234,732,000 | | | 48,361,000 | 223,932,000 | | | 79 | 95 | | | 285 | 20 |
| | Fasilitasi TMMD dan BSMSS | 203,368,272 | 430,000,000 | | | 162,533,600 | 425,695,270 | | | 80 | 99 | | | 111 | 24 |
| | Penyelenggaraan Perombaan Desa | 227,081,250 | 450,000,000 | | | 225,991,250 | 386,782,500 | | | 100 | 86 | | | 98 | (14) |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | 148,866,200 | 150,000,000 | | | 133,136,200 | 134,820,000 | | | 89 | 90 | | | 1 | 0 |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1,894,432,000 | 1,075,992,000 | | | 1,856,422,400 | 1,056,713,000 | | | 98 | 98 | | | (43) | 0 |
| | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa | 153,832,000 | 300,992,000 | | | 151,454,000 | 300,632,000 | | | 98 | 100 | | | 96 | 1 |
| | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa | 700,000,000 | 250,000,000 | | | 700,000,000 | 247,584,000 | | | 100 | 99 | | | (64) | (1) |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Fasilitas Pemilihan Kuwu | 116,980,000 | 0 | | | 116,980,000 | 0 | | | 100 | 0 | | | (100) | (100) |
| | Penyusunan Profil Desa/Kelurahan | 189,000,000 | 200,000,000 | | | 176,954,400 | 192,870,000 | | | 94 | 96 | | | 6 | 3 |
| | Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa | 175,720,000 | 100,000,000 | | | 162,950,000 | 91,660,000 | | | 93 | 92 | | | (43) | (1) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|-------|-------|
| Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa | 26,000,000 | 100,000,000 | | | | 26,000,000 | 99,300,000 | | | | | 100 | 99 | | | | 285 | (1) |
| Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu | 350,000,000 | 0 | | | | 341,904,000 | 0 | | | | | 98 | 0 | | | | (100) | (100) |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 107,900,000 | 100,000,000 | | | | 105,180,000 | 100,000,000 | | | | | 97 | 100 | | | | (7) | 3 |
| Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih | 75,000,000 | 0 | | | | 75,000,000 | 0 | | | | | 100 | 0 | | | | (100) | (100) |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan | 0 | 25,000,000 | | | | 0 | 24,667,000 | | | | | 0 | 99 | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan | 157,576,344 | 74,863,400 | | | | 151,652,400 | 72,113,400 | | | | | 96 | 96 | | | | (52) | 0 |
| Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan | 157,576,344 | 74,863,400 | | | | 151,652,400 | 72,113,400 | | | | | 96 | 96 | | | | (52) | 0 |

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. MEMET SURACHIMAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **14 Pebruari 2017**

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 , SERI E.12

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi Dinas PMD dan program kerja Dinas PMD yang merujuk kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RENSTRA ini akan bermanfaat manakala seluruh Stakeholder pembangunan mempunyai Visi yang sinergis dengan Visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas PMD adalah sebagai mitra dan pemandu masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat ***Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera (AMANA).***

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ini, tentunya masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 , SERI E. 12